



Katalog BPS : 7203002

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government

2010-2013



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Financial Statistics of Province Government



<http://www.bps.go.id>

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2010-2013

Financial Statistics of Province Government 2010-2013

ISSN. 0126.7906

No. Publikasi / Publication Number : 06310.1309

Katalog BPS / BPS Catalogue : 7203002

Ukuran Buku / Book Size : 29,7 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : 151 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Subdirectorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS – Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Bagian Penggandaan

Printing Division

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diolah dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Survei Keuangan Daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi, untuk periode tahun 2010-2012. Selain data realisasi APBD, publikasi ini juga menyajikan data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Desember 2013
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.

INTRODUCTION

Financial Statistics of Province Government is an annual publication that compiled and published by BPS-Statistic Indonesia. The financial data are obtained from the offices of the provincial government through the Financial Survey conducted throughout Indonesia.

The data and information presented in this publication contains data on the realization of Revenue and Expenditure (Budget realization) of the provincial government, for the years 2010-2012. In addition, this publication also presented data on State Revenue and Expenditure Budget in 2013.

We are grateful and thank to all those who have given their support which make this publication available. Constructive criticisms and suggestions from the users are expected for further improvement.

Jakarta, December 2013
BPS-STATISTICS INDONESIA



Dr. Suryamin, M.Sc.
Chief Statistician

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<i>PAGE</i>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	1
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	19

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2010-2013</i>	37
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan / <i>Actual Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt 2010-2013</i>	43
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2010-2013</i>	79
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2010-2013</i>	91
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran / <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2010-2013</i>	95

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u>	<u>HALAMAN</u>
<i>TABLE</i>	<i>PAGE</i>
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2010-2013</i>	131
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2010-2013</i>	140
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2010-2013</i>	144

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Periode yang dicakup adalah empat tahun anggaran, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari

I. GENERAL EXPLANATION

I.1. Preliminary

Provincial Government Finance Statistics publication covers data on Receipt and Expenditure of provincial governments all around Indonesia. The time period is for the four fiscal years, ie from 2010 to 2013.

Some indicators / important information covered in the publication of Provincial Government Finance Statistics, among others are:

- a. Information on actual revenue and expenditure of Provincial Government.*
- b. Information on the potential and the contribution of fund sources in each province.*
- c. Information to determine the type and amount of grant / relief fund for each province, both the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund (DAU).*

In other words, the Provincial Government Finance Statistics publication can be used as an indicator to assess the potential and capabilities of each provinces, in attempting to

masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi yang dikumpulkan melalui survei Keuangan Daerah dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi adalah realisasi / perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

improve the welfare of local communities in its region.

I.2. Scope and Data Collection Method

Provincial Government Finance Statistics data is obtained from Regional Finance and Asset Management Agency of the Governor office all over Indonesia which is collected through Financial Survey by using the questioner K-1 and APBD-1.

1.3. Concept and Definition

Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government is the realization / provincial budget calculations for every fiscal year.

Revenue

Revenue consists of:

- a. *Original Local Government Revenue*
- b. *Balanced Budget*
- c. *Other Legal Revenue*

Original Local Government Revenue is revenue that withheld based on local regulations in accordance with the

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan

legislation, for the purposes of financing their activities. PAD consists of local taxes, retributions, income of regional government corporate and management of separated regional government wealth and other local government revenue.

Local Taxes is revenue that levied based on the local laws and regulations. Local taxes can be divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used by the local government. Local tax revenue consists of motor vehicle tax, title transfer tax, motor vehicle fuel tax, and others.

Retributions is a levy taken in accordance with any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, the replacement cost of printing maps, fishing vessel testing,

bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

the use of regional assets, wholesale or retail markets, the sale of local production, the land use designation permits, licenses route of public transport and other.

Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Regional Government Wealth is revenue in the form of income of regional government corporate and separated regional government wealth which consists of the Regional Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of non-banking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity / investment to a third party.

Other Original Local Government Revenue is the revenue of local government that includes the sale of regional assets that can not be separated, giro services, interest income and commissions, discounts or other forms as a result of the sale and / or supply of goods and / or services by region.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan

***Balanced Budget** is the fund coming from the state budget that allocated to regions to fund their needs in the context of decentralization. Balanced budget consists of Tax share / Non Tax share, General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK).*

***Tax share** consists of land and building tax (PBB), customs of land and buildings right (BPHTB), income tax of Article 25 and Article 29, and Article 21 of the Personal Income Tax, and others.*

***Non-Tax Share** consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration / exploitation / royalties, levies on fishery enterprise and result of fishery, mining oil / gas nature result, and others.*

***General Allocation Fund (DAU)** is the transfer of fund from the central government to local government that is intended to reduce the fiscal gap and the equalization of fiscal capacity*

untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

across regions in order to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special allocation fund (DAK) is a fund set up to the region to meet specific need. There are three criterias for special need as set out in the legislation, namely:

- *The need can not be calculated by using the formula of the general allocation fund*
- *The need is a commitment or a national priority*
- *The need is to finance reforestation and afforestation of the region*

Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other income that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other revenue comprises; grants; emergency fund, which is fund of the state budget allocated to areas

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/ penyeimbang/ penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta

experiencing a national disaster, extraordinary events and / or solvency crisis; tax share from provincial and other local governments; contingency funds / balancing / adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments, and other legal income.

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure

consists of:

1. *Indirect Expenditure*
2. *Direct Expenditure*

Indirect Expenditure is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidies expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.

Indirect Personnel Expenditure is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan / lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

to civil servants based on legislation. Include here are representations and benefits for head and the members of parliament, salaries and benefits of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

Interest Expenditure is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term and long term agreement.

Subsidies Expenditure is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company / organisation, so that the selling price of the goods / services produced can be affordable. The intended company / agency must be providing products or services for public / society needs.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah / BUMN / BUMD, badan / lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat / perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

***Grant Expenditure** is expenditure that has been setting out to give to others as a grant, both in form of money, goods and or services. The grant can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate / state/ enterprises, agencies/ institutions / organizations, or community groups / individuals.*

***Social Assistance Expenditure** is expenditure that has been budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties and others with the aim to improve the welfare of the community.*

***Social Assistance to Community Organizations** is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and has clarity in its use.*

***Social Assistance to Political Party** is the provision of assistance to the political parties that is budgeted under law as social assistance.*

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten / kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan

Sharing Fund Expenditure to Provincial / District / City and Village Government is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to district / city, village, or a particular local government revenue that is given to other local governments in accordance with law.

This expenditure consists of:

- Tax shares expenditure to the provincial government
- Local tax shares expenditure to the district / city
- Local tax shares expenditure to the village government
- Local retribution shares to the district / city
- Local retribution shares to village government

Financial Assistance Expenditure to Provincial / District / City and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the district / city, village government, or other local governments for the purpose of equalizing and increasing the financial capability.

kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

General financial assistance is the assistance from the local government where the use and the management of fund delivered is done by the recipient government. Specific financial assistance is the assistance where the used and the management of fund is directed by the donor government.

Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*
- *Financial assistance to district / city government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local governments / other village governments*

Unpredicted Expenditure is expenses used for the activities that are unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan

***Direct Expenditure** is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditures, that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities.*

***Direct Personnel Expenditure** is expenses used for honorarium / wages, overtime and other expenses to increase employee motivation and quality in implementing government programs and activities.*

***Goods and Services Expenditure** is expenses used for purchasing / procurement of goods that worth less than a year (non durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government.*

Purchasing / procurement of the goods and services among other are for non durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers and other goods and services.

pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

Capital Expenditure is expenses used for purchasing / procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods).

The establishment of these assets include provision of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural tools, equipment and office supplies, computers, mebeulair, kitchen appliances, room interior design, studio equipment, communication tools, measuring tools, medical equipment, laboratory equipment, construction of roads, bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, buildings, books/literature, arts, animal procurement / livestock and plants, as well as weapons / security.

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and / or expenditure that will be readmitted, both in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing receipt and financing expenditure.

dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan daerah ;
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

Total net financing should be able to cover the budget deficit, on the other way around budget surplus would be allocated to finance expenses, whether for payment of principal, as well as for investment or the creation of a reserved fund.

Local government financing consists of:

1. *Local government financing receipt;*
 - a. *Last fiscal year budget surplus*
 - b. *Transfer from reserved fund*
 - c. *Receipt form loans and bonds*
 - d. *Income of separated selling assets*
2. *Local government financing expenditure;*
 - a. *Transfer to reserved fund*
 - b. *Equity*
 - c. *Principal payment of debt*
 - d. *Current fiscal year budget surplus*

Last Fiscal Year Budget Surplus is *last fiscal year surplus / deficit plus the financing receipt less financing expenditure.*

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

***Reserved Fund Disbursement** is revenue derived from the disbursement of the reserve fund, i.e from reserved fund account to general cash account along the current fiscal year.*

***Income of Separated Property Sales Results** is the selling of government assets through third parties, or the income of local government divestment of equity.*

***Local Government Revenue from Loan** is revenue from the loans, including the issuance of local bonds that will be issued in the current fiscal year.*

***Revenue from Lending** is all revenue obtained from lending to the central government and / or to other local governments.*

***Establishment of Reserved Fund** is expenditure to establish a reserved fund to finance activities that the provision of funds can not fully implemented in one fiscal year.*

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Equity (Investment) of Local Government is government expenses that allocated to equity / investment, both in the short and long term, permanent or non-permanent. This investment can be in the form of deposit, the purchase of government securities (GS), Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (SPN), shares, investment in state / public enterprises, purchase of bonds and long-term debt.

Payment of Principal Debt is the payment of the principal debt which is calculated based on the short, medium and long term agreement.

Regional Lending is government spending in the form of lending to the central government, local government, and / or third parties.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus is a surplus / deficit plus the financing receipt less financing expenditure.

<http://www.bps.go.id>

II. URAIAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

II. BRIEF DESCRIPTION

Regional development is essentially an effort to create the government with reliable and professional capabilities. As an integral part of national development which aims to improve the living standar and welfare of the people, development in the local government, both at the provincial level and district / city level must be carried out effectively and efficiently. Thereby, the regional independency and equality of development will be achieved.

The issue of financial independence becomes very important, particularly the ones that relate to regional financial contribution to regional economic growth. The contribution of local government expenditure on regional economic growth is an opportunity that should be utilized optimally to stimulate the local economy.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Dealing with the matter, the provincial government formulates the Receipt and Expenditure budget (APBD) Province as a form of regional development planning. In the APBD, the details of programs that will be implemented along with funding sources were recorded. Budgeting should be arranged in such a way, so it can improve the performance of regional government and public services oriented.

The sources of funds for financing the regional development should be come from the region's own financial ability, with the aim to accelerate the government independency. In other words the local government must be spured to increase the capability in financing the organization and public services by utilized their own potensial fund.

II.1. Pendapatan Daerah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2010-2012 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 116,80 triliun rupiah pada tahun 2010, menjadi 140,00 triliun rupiah pada tahun 2011 dan 186,01 triliun rupiah pada tahun 2012 atau mengalami pertumbuhan masing-masing 19,86 persen dan 32,86 persen. Pada tahun 2013 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 6,71 persen menjadi 198,49 triliun rupiah. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli daerah terutama komponen pajak daerah. Hal ini merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerah sejak beberapa tahun yang lalu.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, berarti daerah tersebut telah dapat

II.1. Revenue

Table A shows that the realization of the Provincial government's total revenue in Indonesia during 2010-2012 keep increasing, with the total revenue of 116.80 trillion rupiahs in 2010, 140.00 trillion rupiahs in 2011 and 186.01 trillion rupiahs in 2012, or increased by 19.86 percent, and 32.86 percent respectively. In 2013, the revenue of provincial government is targeted to increase by 6.71 percent to 198.49 trillion rupiahs. The increasing mostly caused by the increase of original government revenue, especially from tax component. This condition is the result of the efforts that have been made to increase revenue of the provincial government since few years ago.

The Original Local Government Revenue (PAD) is one of the important sources of income for the region. The local government that has capability to increase its PAD significantly, meaning that this region has been able to utilized

Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah)/Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (Billion Rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pendapatan	2 010	2 011	2 012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	56 727	73 620	86 542	92 453
a.	Pajak Daerah	47 301	62 759	72 997	78 815
b.	Retribusi Daerah	1 455	1 409	2 646	2 304
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 933	2 524	2 642	2 883
d.	Lain-lain PAD yang Sah	6 038	6 928	8 257	8 452
2.	Dana Perimbangan	47 520	52 780	61 998	62 149
a.	Bagi Hasil Pajak	17 557	16 448	21 315	17 661
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 896	12 509	11 969	11 538
c.	Dana Alokasi Umum	19 247	22 553	27 382	31 116
d.	Dana Alokasi Khusus	820	1 270	1 333	1 833
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	12 556	13 601	37 470	43 892
JUMLAH/TOTAL		116 802	140 001	186 010	198 494

*) Data APBD

memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selama periode tahun 2010-2012, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 56,73 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi masing-masing sebesar 73,62 triliun rupiah dan 86,54 triliun rupiah pada tahun 2011 dan 2012. Peningkatan ini didukung oleh penerimaan pajak daerah. Peran kedua terbesar setelah pajak daerah yaitu dari lain-lain PAD yang sah, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah. Pada tahun 2013, PAD ditargetkan naik menjadi 92,45 triliun rupiah, dimana

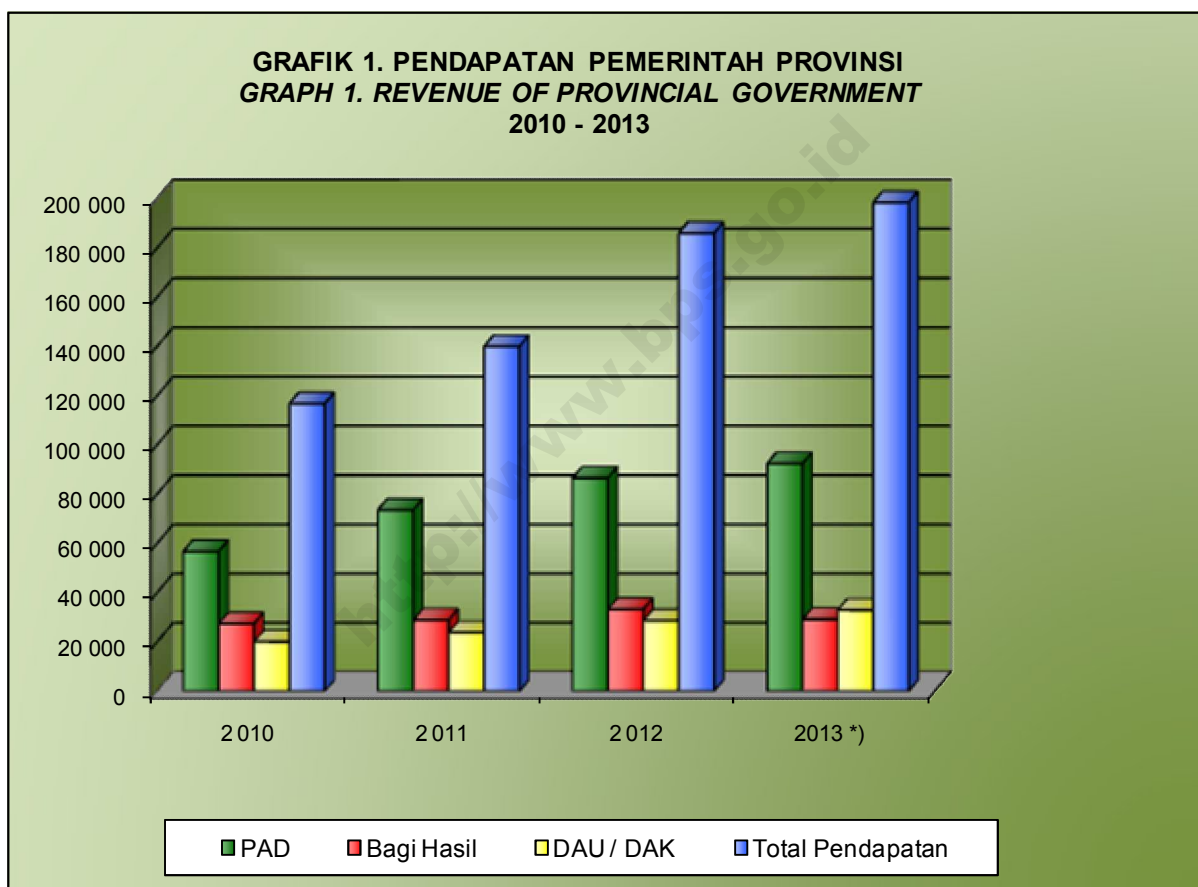
the existing potential optimally. During the period 2010-2012, the development of PAD was steady increasing, i.e, from 56.73 trillion rupiah in 2010 to 73.62 trillion rupiahs and 86.54 trillion rupiahs in 2011 and 2012 respectively. This increasing was supported by local tax revenue. The second biggest contribution was from other legal PAD, followed by management of separated local government wealth, and retributions. In 2013, PAD is targeted to increase to 92.45 trillion rupiahs, where the income from tax is still

penerimaan pajak ditargetkan tetap meningkat walaupun tidak terlalu tinggi.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah

targeted to increase but not too high as before.

PAD is an important component in measuring the financial independence of a local government. The greater the role of PAD in the budget, the more independence is the local government. If the level of



semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah "**rendah sekali**", dapat dikatakan bahwa pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

independence of a region is "very low", it can be said that the central government has the dominant role than the local government itself.

Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan

Meanwhile, if a region has a degree of independence "low", it means that the central government intervention has been decreasing, because the region is considered to be a little more able to

Tabel B. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian
The Distribution of Province in Indonesia by Rate Independence Category
 2010 - 2013

Kategori Kemandirian	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendah Sekali (0-25 %)	7	7	9	9
Rendah (>25-50 %)	14	14	16	15
Sedang (>50-75 %)	12	9	8	9
Tinggi (>75%)	0	3	0	0
Jumlah	33	33	33	33

*) Data APBD

otonomi daerah. Kategori “sedang”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

implement regional autonomy. Then, for the government with "medium" category, it means that the region have been able to implement regional autonomy, while the category of "high", it could be mean that the local government has capable and independent in carrying out the affairs of local autonomy.

Kontribusi PAD pada penerimaan pemerintah provinsi, pada tahun 2010 sebesar 48,57 persen. Tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada

PAD contribution to total revenue in 2010 was 48.57 percent.

tahun tersebut masih dikategorikan rendah. Namun demikian pada tahun 2011 tingkat kemandirian daerah sudah masuk dalam kategori sedang, yaitu berkisar 52,59 persen. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi semakin mandiri.

Thus on the average, the level of independence of the provinces in Indonesia for the year was still considered as low. However in 2011 the independence level was medium, i.e 52.59 percent. It is an indicator that in general, the provincial government

Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (persen)/Revenue Contribution of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Revenue (percent), 2010 - 2013

No.	Jenis Pendapatan	2 010	2 011	2 012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	48,57	52,59	46,53	46,58
a.	Pajak Daerah	40,50	44,83	39,24	39,71
b.	Retribusi Daerah	1,25	1,01	1,42	1,16
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,65	1,80	1,42	1,45
d.	Lain-lain PAD yang Sah	5,17	4,95	4,44	4,26
2.	Dana Perimbangan	40,68	37,70	33,33	31,31
a.	Bagi Hasil Pajak	15,03	11,75	11,46	8,90
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8,47	8,93	6,43	5,81
c.	Dana Alokasi Umum	16,48	16,11	14,72	15,68
d.	Dana Alokasi Khusus	0,70	0,91	0,72	0,92
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10,75	9,71	20,14	22,11
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Sedangkan pada tahun 2012 kontribusi PAD kembali turun menjadi 46,53 persen. Demikian pula halnya untuk tahun 2013, pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam mentargetkan anggaran PAD-nya, karena khawatir

became more independence. In 2012, PAD contribution decrease to 46.53 percent. In 2013, the Provincial Government was very careful in targeting PAD, for the reason of fearness that they could not meet the

tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya tidak mencapai 50 persen.

Dari sumber penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang paling dominan. Besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2010-2012 adalah 40,50 persen, 44,83 persen dan 39,24 persen terhadap total pendapatan.

Selain dari PAD, sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah tetapi dikelola oleh pemerintah pusat adalah beberapa komponen pajak dan beberapa sumber daya alam, yang sebagian pendapatannya dikembalikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pendapatan kedua jenis bagi hasil tersebut tercatat sebesar 27,45 triliun rupiah pada tahun 2010, naik menjadi 28,96 triliun rupiah pada tahun 2011 lalu meningkat menjadi 33,28 triliun rupiah pada tahun 2012. Sedangkan anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam pada tahun 2013 tidak begitu optimis

target, consequently the portion of PAD to total revenue could not reach 50 percent.

The local taxes is the component of PAD that has dominant contribution to total revenue. The contribution of local taxes in 2010-2012 was 40.50 percent, 44.83 percent and 39.24 percent to the total revenue.

Other than PAD, local government has another fund sources that come from local resources, but managed by central government. Those are some components of taxes, and few natural resources, where some part of their revenue were returned to the local government in kind of tax shares and natural resources share. Revenue from these shares was amounted to 27.45 trillion rupiahs in 2010, increase to 28.96 trillion rupiahs in 2011 then reached 33.28 trillion rupiahs in 2012. Meanwhile the shares budget for 2013 was not so optimistic, it was only 29.20 trillion rupiahs in target.

dengan menetapkan anggaran sebesar 29,20 triliun rupiah.

Selanjutnya, pada tabel C dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dari tahun 2010 ke tahun 2012 semakin menurun. Disisi lain jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat, menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah Pusat hanya kurang dari 20 persen.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 40,68 persen, 37,70 persen, dan 33,33 persen terhadap total pendapatan pada tahun 2010-2012. Pada tahun 2013 dana perimbangan telah dianggarkan dengan kontribusi 31,31 persen terhadap total pendapatan. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu 1) dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, 2) dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Moreover, from Table C, it can be seen that the percentage of revenue derived from balanced budget decreased from 2010 to 2012. On the other side, based on the amount of DAU and DAK given by central government, it indicated that the dependency level of local governments was less than 20 percent.

Revenue derived from the balanced budget has a tendency to decrease with a contribution of 40.68 percent, 37.70 percent and 33.33 percent to total revenue during the period of 2010-2012. In 2013, the balanced budget was set up to have contribution of 31.31 percent. The balanced budget consists of two parts, namely, 1) the revenue from tax shares and natural resource shares, 2) the allocation of funds which include the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) that come from central government fund transfers. The highest contribution of the balanced budget was from General

(DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan ini berasal dari dana alokasi umum, diikuti oleh bagi hasil pajak. Sedangkan dana alokasi khusus porsinya sangat kecil, karena memang diberikan untuk kegiatan / kejadian khusus saja.

Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah yang paling kecil kontribusinya terhadap total pendapatan dibandingkan PAD dan dana perimbangan. Pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi komponen ini hanya sebesar 10,75 persen dan 9,71 persen dari total pendapatan. Sementara itu pada tahun 2012, terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 20,14 persen. Demikian pula untuk tahun 2013, lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan mencapai 22,11 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dana penyesuaian yang diterima oleh masing-masing provinsi.

Allocation Fund (DAU) component, followed by tax shares. Meanwhile, for Special Allocation Fund (DAK), the share was very low, because it is only given to the special / certain activities of local government.

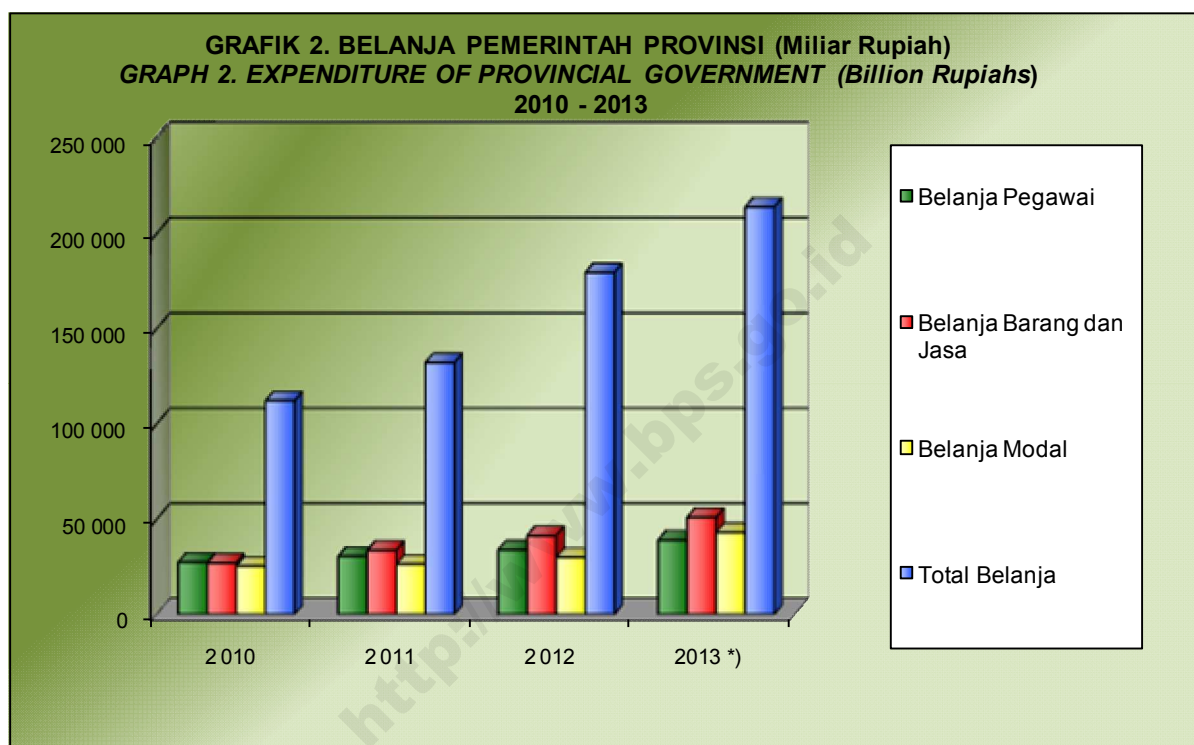
Then, the other component of local government receipt is other legal revenue that has the smallest contribution to total revenue, compared to PAD and balanced budget. In 2010 and 2011 its contribution amounted to 10.75 percent and 9.71 percent, while in 2012, it increased quite high at 20.14 percent. Similarly, for 2013, other legal revenue was expected to increase by 22.11 percent. This increase is due to increased of funding adjustments received by each province.

II.3. Belanja Daerah

Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2010-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 112,15 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 132,22 triliun

II.3. Local Government Expenditure

In general, local government expenditure during 2010-2012 experienced an increase every year, that was, 112.15 trillion rupiahs in 2010 to 132.22 trillion rupiahs in 2011 and



rupiah tahun 2011 dan 179,45 triliun rupiah pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatannya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

179.45 trillion rupiahs in 2012. This is in line with the increase in revenue. This increase was due to the increase in almost all types of expenditure, both indirect expenditure and direct expenditure.

Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah) / Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (Billion Rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Belanja	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53 152	66 590	101 469	111 930
1.	Belanja Pegawai	20 693	24 826	27 209	31 076
2.	Belanja Bunga	9	15	26	89
3.	Belanja Subsidi	65	40	27	43
4.	Belanja Hibah	4 428	7 369	33 609	36 812
5.	Belanja Bantuan Sosial	3 627	4 008	1 402	3 110
6.	Belanja Bagi Hasil	13 628	17 301	20 956	20 441
7.	Belanja Bantuan Keuangan	10 552	12 842	18 004	19 234
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	150	191	236	1 125
B.	BELANJA LANGSUNG	59 001	65 627	77 977	101 939
1.	Belanja Pegawai	6 670	5 638	6 637	7 940
2.	Belanja Barang dan Jasa	26 992	33 657	41 370	50 944
3.	Belanja Modal	25 339	26 333	29 970	43 054
JUMLAH/TOTAL		112 153	132 217	179 446	213 869

*) Data APBD

Dilihat dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa komponen belanja terbesar didominasi oleh belanja barang dan jasa, walaupun di tahun 2010, komponen total belanja pegawai masih sedikit lebih besar dari belanja barang dan jasa. Pada tahun 2010-2012, belanja tersebut tercatat sebesar 26,99 triliun rupiah, 33,66 triliun rupiah dan 41,37 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 24,69 persen di tahun 2011, dan 22,92 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 belanja barang dan jasa

Based on the expenditure structure, it can be seen that the dominant component of the expenditure was goods and services expenditure, although in the year 2010, total personnel expenditure component was higher than goods and services expenditure. In 2010-2012, the goods and services expenditure was recorded to 26.99 trillion rupiahs, 33.66 and 41.37 trillion rupiahs or increased by 24.69 percent in 2011, and 22.92 percent in 2012. In 2013, goods and services expenditure are budgeted at

dianggarkan sebesar 50,94 triliun rupiah atau 23,14 persen lebih tinggi dari realisasi belanja tahun 2012.

50.94 trillion rupiahs or 23.14 percent higher than the actual expenditure 2012.

Tabel E. Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (persen) / Contribution of Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (percent), 2010-2013

No.	Jenis Belanja	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		47,39	50,36	56,55	52,34
1.	Belanja Pegawai	18,45	18,78	15,16	14,53
2.	Belanja Bunga	0,01	0,01	0,01	0,04
3.	Belanja Subsidi	0,06	0,03	0,02	0,02
4.	Belanja Hibah	3,95	5,57	18,73	17,21
5.	Belanja Bantuan Sosial	3,23	3,03	0,78	1,45
6.	Belanja Bagi Hasil	12,15	13,09	11,68	9,56
7.	Belanja Bantuan Keuangan	9,41	9,71	10,03	8,99
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0,13	0,14	0,13	0,53
B. BELANJA LANGSUNG		52,61	49,64	43,45	47,66
1.	Belanja Pegawai	5,95	4,26	3,70	3,71
2.	Belanja Barang dan Jasa	24,07	25,46	23,05	23,82
3.	Belanja Modal	22,59	19,92	16,70	20,13
JUMLAH/TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Data APBD

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai. Belanja pegawai ini merupakan gabungan dari belanja pegawai langsung, dan belanja pegawai tidak langsung. Pada tahun 2010 belanja pegawai tercatat sebesar 27,36 triliun rupiah atau 24,40 persen terhadap total belanja. Pada tahun 2011 total realisasi belanja pegawai sebesar 30,46 triliun rupiah (23,04 persen) dan belanja pegawai pada tahun 2012 hanya 33,85

The next dominant component of expenditure is personnel expenditure, which in this case, covers both the indirect and direct personnel expenditure. Personnel expenditure in 2010 was amounted to 27.36 trillion rupiahs or 24.40 percent to total expenditure. In 2011, the total personnel expenditure was amounted to 30.46 trillion rupiahs (23.04 percent) and in 2012 it was only 33,85 trillion rupiahs or 18.86 percent to total

triliun rupiah atau hanya sebesar 18,86 persen dari total belanja. Demikian pula pada tahun 2013 belanja pegawai diperkirakan lebih rendah dari belanja barang dan jasa.

Belanja modal juga memiliki nilai yang cukup besar yaitu 25,34 triliun rupiah pada tahun 2010, 26,33 triliun rupiah pada tahun 2011, dan 29,97 triliun rupiah pada tahun 2012. Pada tahun 2013 belanja modal dianggarkan sebesar 43,05 triliun rupiah.

Selanjutnya, bila dilihat dari struktur belanja langsung dan tidak langsung terlihat bahwa belanja langsung lebih besar dibanding tidak langsung pada tahun 2010. Sebaliknya pada tahun 2011 dan 2012, belanja tidak langsung persinya lebih besar. Dalam belanja tidak langsung, komponen yang cukup dominan adalah belanja pegawai dan belanja bagi hasil. Kontribusi kedua jenis belanja ini pada tahun 2011 adalah 18,78 persen dan 13,09 persen terhadap total belanja. Sementara itu, pada belanja langsung, komponen yang cukup besar adalah belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kontribusi keduanya adalah

expenditure. Similarly, personnel expenditure in 2013 is estimated to be lower than goods and services expenditure.

Capital expenditure also has considerable value, namely 25.34 trillion rupiahs in 2010, 25.33 trillion rupiahs in 2011, and 29.97 trillion rupiahs in 2012. In 2013, it was budgeted as much as 43.05 trillion rupiahs.

Then, if viewed based on direct and indirect expenditure, it can be seen that the portion of direct expenditure was higher than indirect expenditure in 2010. On the other way, in 2011 and 2012, the portion of indirect expenditure was higher. The components of indirect expenditure that significantly high were personnel expenditure and sharing fund expenditure. The contributions of these kind of expenditure in 2011 was 18.78 percent and 13.09 percent to total expenditure respectively. Meanwhile, in direct expenditure structure, the item with highest portion was goods and expenditure. The contribution of both

46,66 persen tahun 2010, 45,37 persen tahun 2011 dan 39,76 persen pada tahun 2012 terhadap total belanja.

Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2010-2012, secara umum provinsi memperoleh surplus. Sedangkan pada tahun anggaran 2013 diperkirakan belanja daerah mencapai 213,87 triliun rupiah, dan diperkirakan mengalami defisit sehingga harus menggunakan pendapatan pembiayaan untuk menutup kekurangannya.

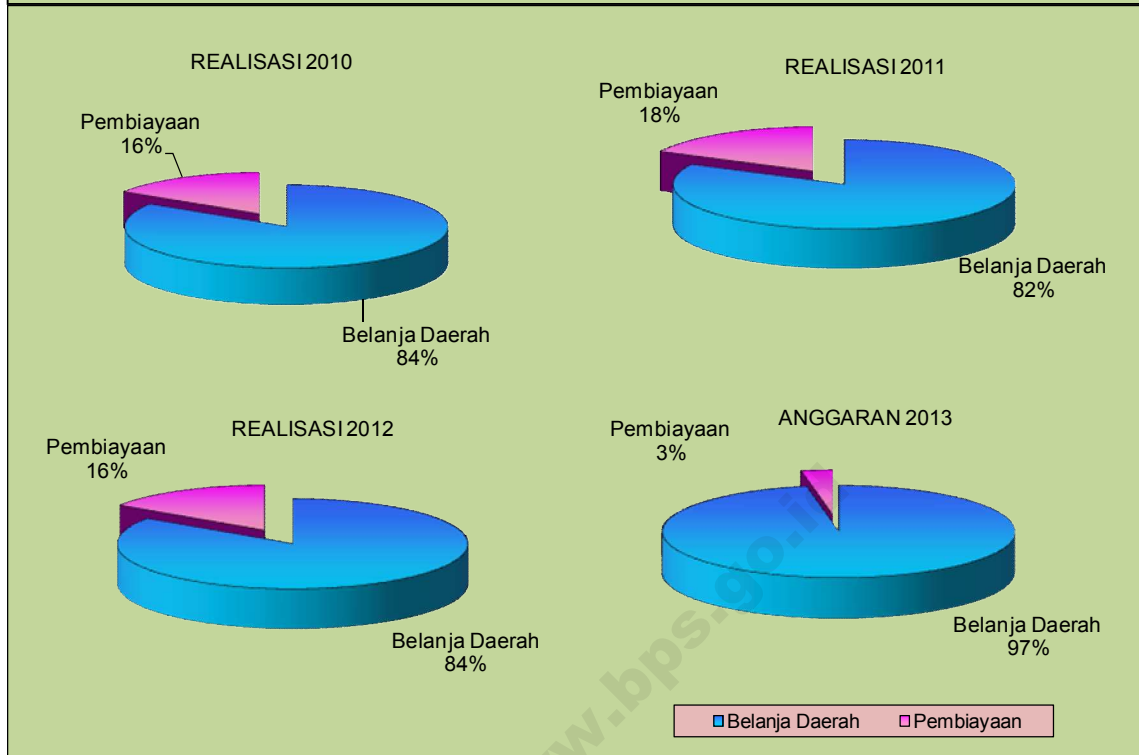
Penyerapan anggaran daerah yang merupakan presentase realisasi belanja terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2010-2012. Pada tahun 2010 penyerapan anggaran mencapai 84,03 persen, namun turun menjadi 82,38 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penyerapan anggaran kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar 84,46 persen. Sedangkan target penyerapan anggaran pada tahun 2013 adalah 97,06 persen (grafik 3).

expenditure were around 46.66 in 2010, 45.37 percent in 2011 and 39.76 percent in 2012 percent to total expenditure.

In terms of the realization of receipt and expenditure, generally, in 2010-2012, the provinces have the surplus budget. Whereas, in fiscal year 2013, the local expenditure was targeted at 213.87 trillion rupiahs, and deficit was predicted occurred this year, so the financing receipt must be used to cover the deficit.

The absorption of local budget, which is respresented by the percentage of actual expenditure to total receipt, experienced a fluctuation during 2010-2012. In 2010, it was recorded as much as 84.03 percent, then decreased to 82.38 percent in 2011. In 2012, the absorption of budget increased to 84.46 percent. Meanwhile, the target of budget absorption in 2013 was 97.06 percent (graph 3).

GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI
GRAPH 3. BUDGET ABSORPTION OF PROVINCIAL GOVERNMENT
2010 - 2013



TABEL

TABLE 1.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 1.a REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010
TABLE 1.a ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	6 967 815 083	1 842 988 678	8 810 803 761	7 528 516 368	1 282 287 393	8 810 803 761
2.	Sumatera Utara	3 885 636 140	346 533 462	4 232 169 602	3 666 706 174	565 463 428	4 232 169 602
3.	Sumatera Barat	1 920 971 383	673 887 321	2 594 858 704	2 239 753 492	355 105 212	2 594 858 704
4.	R i a u	4 346 845 188	114 587 470	4 461 432 658	4 267 432 658	194 000 000	4 461 432 658
5.	J a m b i	1 640 185 858	201 204 877	1 841 390 735	1 488 130 350	353 260 385	1 841 390 735
6.	Sumatera Selatan	3 224 159 595	315 250 644	3 539 410 239	3 108 036 632	431 373 607	3 539 410 239
7.	Bengkulu	1 000 860 633	10 570 146	1 011 430 779	971 198 561	40 232 218	1 011 430 779
8.	Lampung	2 091 684 131	79 029 066	2 170 713 197	2 004 899 187	165 814 010	2 170 713 197
9.	Bangka Belitung	848 025 113	264 129 736	1 112 154 849	862 715 774	249 439 075	1 112 154 849
10.	Kepulauan Riau	1 853 589 773	242 173 799	2 095 763 572	1 723 574 713	372 188 859	2 095 763 572
11.	DKI Jakarta	23 025 986 993	3 748 512 147	26 774 499 140	21 552 895 839	5 221 603 301	26 774 499 140
12.	Jawa Barat	9 742 187 781	1 789 756 684	11 531 944 465	9 020 608 021	2 511 336 444	11 531 944 465
13.	Jawa Tengah	6 626 316 989	904 356 288	7 530 673 277	5 968 033 770	1 562 639 507	7 530 673 277
14.	D I Yogyakarta	1 374 205 096	256 568 355	1 630 773 451	1 354 594 058	276 179 393	1 630 773 451
15.	Jawa Timur	9 980 544 750	1 995 753 452	11 976 298 202	10 206 317 103	1 769 981 099	11 976 298 202
16.	Banten	3 139 437 626	235 495 508	3 374 933 134	2 834 570 528	540 362 606	3 374 933 134
17.	B a l i	2 237 707 339	538 452 871	2 776 160 210	1 985 850 057	790 310 153	2 776 160 210
18.	Nusa Tenggara Barat	1 272 218 059	73 514 841	1 345 732 900	1 275 746 585	69 986 315	1 345 732 900
19.	Nusa Tenggara Timur	1 088 071 459	224 112 521	1 312 183 980	1 148 082 390	164 101 590	1 312 183 980
20.	Kalimantan Barat	1 778 927 314	173 009 098	1 951 936 412	1 700 202 329	251 734 083	1 951 936 412
21.	Kalimantan Tengah	1 555 426 286	57 885 383	1 613 311 669	1 477 348 175	135 963 494	1 613 311 669
22.	Kalimantan Selatan	2 279 776 309	492 660 308	2 772 436 617	2 410 095 344	362 341 273	2 772 436 617
23.	Kalimantan Timur	7 044 556 875	808 568 904	7 853 125 779	5 918 568 095	1 934 557 684	7 853 125 779
24.	Sulawesi Utara	1 158 671 349	347 025 574	1 505 696 923	1 137 423 445	368 273 478	1 505 696 923
25.	Sulawesi Tengah	1 177 609 898	177 052 220	1 354 662 118	1 127 256 721	227 405 397	1 354 662 118
26.	Sulawesi Selatan	2 564 075 935	230 448 199	2 794 524 134	2 486 159 765	308 364 369	2 794 524 134
27.	Sulawesi Tenggara	1 055 173 630	106 197 607	1 161 371 237	1 125 687 951	35 683 286	1 161 371 237
28.	Gorontalo	593 415 093	65 070 534	658 485 627	567 080 442	91 405 185	658 485 627
29.	Sulawesi Barat	610 378 110	23 221 030	633 599 140	607 672 166	25 926 974	633 599 140
30.	M a l u k u	952 660 802	58 385 591	1 011 046 393	950 281 175	60 765 218	1 011 046 393
31.	Maluku Utara	695 828 538	2 872 955	698 701 493	682 723 184	15 978 309	698 701 493
32.	Papua Barat	3 407 802 988	129 160 000	3 536 962 988	3 104 771 915	432 191 073	3 536 962 988
33.	P a p u a	5 661 736 549	142 102 552	5 803 839 101	5 650 474 892	153 364 209	5 803 839 101
JUMLAH/TOTAL		116 802 488 665	16 670 537 821	133 473 026 486	112 153 407 859	21 319 618 627	133 473 026 486

TABEL 1.b REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011
TABLE 1.b ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	7 610 320 146	1 306 726 214	8 917 046 360	7 374 625 288	1 542 421 072	8 917 046 360
2.	Sumatera Utara	4 958 481 902	404 884 723	5 363 366 625	4 611 477 163	751 889 462	5 363 366 625
3.	Sumatera Barat	2 071 161 196	335 221 212	2 406 382 408	2 328 765 074	77 617 334	2 406 382 408
4.	R i a u	5 440 440 485	421 520 453	5 861 960 938	4 265 129 661	1 596 831 277	5 861 960 938
5.	J a m b i	2 078 806 913	353 260 385	2 432 067 298	1 750 241 856	681 825 442	2 432 067 298
6.	Sumatera Selatan	3 963 984 966	390 314 822	4 354 299 788	3 806 079 835	548 219 953	4 354 299 788
7.	Bengkulu	1 166 982 246	39 678 718	1 206 660 964	1 009 215 053	197 445 911	1 206 660 964
8.	Lampung	2 527 990 902	161 181 629	2 689 172 531	2 566 078 806	123 093 725	2 689 172 531
9.	Bangka Belitung	1 193 497 245	240 432 353	1 433 929 598	1 176 683 816	257 245 782	1 433 929 598
10.	Kepulauan Riau	1 876 879 092	375 005 362	2 251 884 454	1 947 593 445	304 291 009	2 251 884 454
11.	DKI Jakarta	28 297 361 175	4 926 078 266	33 223 439 441	26 423 682 189	6 799 757 252	33 223 439 441
12.	Jawa Barat	11 053 859 588	2 449 742 872	13 503 602 460	10 295 569 845	3 208 032 615	13 503 602 460
13.	Jawa Tengah	7 547 669 804	1 239 075 792	8 786 745 596	7 776 705 827	1 010 039 769	8 786 745 596
14.	D I Yogyakarta	1 604 910 831	254 231 964	1 859 142 795	1 294 221 395	564 921 400	1 859 142 795
15.	Jawa Timur	11 493 375 583	1 564 783 382	13 058 158 965	11 685 920 672	1 372 238 293	13 058 158 965
16.	Banten	3 755 614 332	535 848 290	4 291 462 622	3 901 218 115	390 244 507	4 291 462 622
17.	B a l i	2 662 077 116	704 385 153	3 366 462 269	2 564 801 495	801 660 774	3 366 462 269
18.	Nusa Tenggara Barat	1 689 351 249	17 280 030	1 706 631 279	1 650 601 275	56 030 004	1 706 631 279
19.	Nusa Tenggara Timur	1 324 470 172	120 234 844	1 444 705 016	1 231 882 713	212 822 303	1 444 705 016
20.	Kalimantan Barat	2 202 217 037	231 734 083	2 433 951 120	1 996 323 546	437 627 574	2 433 951 120
21.	Kalimantan Tengah	1 921 944 863	132 100 592	2 054 045 455	1 524 344 270	529 701 185	2 054 045 455
22.	Kalimantan Selatan	3 148 042 882	324 878 615	3 472 921 497	2 465 733 715	1 007 187 782	3 472 921 497
23.	Kalimantan Timur	9 817 099 927	1 652 437 549	11 469 537 476	8 143 272 619	3 326 264 857	11 469 537 476
24.	Sulawesi Utara	1 365 705 444	109 273 479	1 474 978 923	1 285 864 832	189 114 091	1 474 978 923
25.	Sulawesi Tengah	1 410 593 609	220 705 398	1 631 299 007	1 426 082 334	205 216 673	1 631 299 007
26.	Sulawesi Selatan	3 110 566 841	290 514 746	3 401 081 587	3 177 043 310	224 038 277	3 401 081 587
27.	Sulawesi Tenggara	1 288 979 728	198 733 017	1 487 712 745	1 328 024 700	159 688 045	1 487 712 745
28.	Gorontalo	697 576 031	96 844 215	794 420 246	724 528 423	69 891 823	794 420 246
29.	Sulawesi Barat	718 871 064	25 751 453	744 622 517	731 367 815	13 254 702	744 622 517
30.	M a l u k u	1 138 187 347	55 485 451	1 193 672 798	1 109 921 429	83 751 369	1 193 672 798
31.	Maluku Utara	936 792 069	15 732 309	952 524 378	724 375 048	228 149 330	952 524 378
32.	Papua Barat	3 699 884 166	353 183 633	4 053 067 799	3 629 959 955	423 107 844	4 053 067 799
33.	P a p u a	6 227 545 145	955 938 778	7 183 483 923	6 290 375 713	893 108 210	7 183 483 923
JUMLAH/TOTAL		140 001 241 096	20 503 199 782	160 504 440 878	132 217 711 232	28 286 729 646	160 504 440 878

TABEL 1.c REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012
TABLE 1.c ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	9 180 143 048	1 508 840 609	10 688 983 657	8 757 319 944	1 931 663 713	10 688 983 657
2.	Sumatera Utara	7 201 839 293	720 866 154	7 922 705 447	7 633 634 510	289 070 937	7 922 705 447
3.	Sumatera Barat	2 922 582 140	361 250 283	3 283 832 423	2 962 291 216	321 541 207	3 283 832 423
4.	R i a u	6 847 315 820	1 906 680 479	8 753 996 299	6 670 765 137	2 083 231 162	8 753 996 299
5.	J a m b i	2 654 694 237	632 401 128	3 287 095 365	2 531 598 313	755 497 052	3 287 095 365
6.	Sumatera Selatan	5 223 884 081	477 175 785	5 701 059 866	5 060 922 722	640 137 144	5 701 059 866
7.	Bengkulu	1 562 525 395	197 339 471	1 759 864 866	1 518 452 805	241 412 061	1 759 864 866
8.	Lampung	3 742 004 283	117 688 684	3 859 692 967	3 834 735 543	24 957 424	3 859 692 967
9.	Bangka Belitung	1 384 937 385	242 123 559	1 627 060 944	1 332 038 720	295 022 224	1 627 060 944
10.	Kepulauan Riau	2 473 411 609	290 737 799	2 764 149 408	2 249 825 415	514 323 993	2 764 149 408
11.	DKI Jakarta	35 379 180 052	6 475 552 012	41 854 732 064	31 558 706 899	10 296 025 165	41 854 732 064
12.	Jawa Barat	16 878 128 995	3 003 186 559	19 881 315 554	16 922 477 598	2 958 837 956	19 881 315 554
13.	Jawa Tengah	11 694 479 699	707 735 960	12 402 215 659	11 446 844 105	955 371 554	12 402 215 659
14.	D I Yogyakarta	2 171 734 308	293 608 593	2 465 342 901	2 053 825 959	411 516 942	2 465 342 901
15.	Jawa Timur	15 543 039 549	1 359 475 042	16 902 514 591	15 311 542 331	1 590 972 260	16 902 514 591
16.	Banten	5 413 705 184	374 844 507	5 788 549 691	5 317 735 488	470 814 203	5 788 549 691
17.	B a l i	3 633 133 585	787 311 641	4 420 445 226	3 562 732 997	857 712 229	4 420 445 226
18.	Nusa Tenggara Barat	2 242 817 129	17 713 224	2 260 530 353	2 189 181 841	71 348 512	2 260 530 353
19.	Nusa Tenggara Timur	2 241 542 051	188 710 799	2 430 252 850	2 164 355 592	265 897 258	2 430 252 850
20.	Kalimantan Barat	2 932 912 821	383 302 411	3 316 215 232	3 043 956 905	272 258 327	3 316 215 232
21.	Kalimantan Tengah	2 514 031 289	451 605 920	2 965 637 209	2 351 347 320	614 289 889	2 965 637 209
22.	Kalimantan Selatan	4 381 610 479	933 954 408	5 315 564 887	4 004 269 327	1 311 295 560	5 315 564 887
23.	Kalimantan Timur	11 886 470 505	2 837 723 895	14 724 194 400	11 357 197 738	3 366 996 662	14 724 194 400
24.	Sulawesi Utara	1 834 908 288	189 114 090	2 024 022 378	1 771 118 336	252 904 042	2 024 022 378
25.	Sulawesi Tengah	1 962 393 167	209 216 673	2 171 609 840	2 013 021 740	158 588 100	2 171 609 840
26.	Sulawesi Selatan	4 433 963 020	212 338 656	4 646 301 676	4 603 648 280	42 653 396	4 646 301 676
27.	Sulawesi Tenggara	1 811 984 328	23 590 982	1 835 575 310	1 714 896 024	120 679 286	1 835 575 310
28.	Gorontalo	933 169 935	63 968 779	997 138 714	885 021 161	112 117 553	997 138 714
29.	Sulawesi Barat	959 029 569	19 000 000	978 029 569	868 132 634	109 896 935	978 029 569
30.	M a l u k u	1 436 645 207	78 105 094	1 514 750 301	1 355 988 110	158 762 191	1 514 750 301
31.	Maluku Utara	1 196 746 356	199 701 142	1 396 447 498	1 259 660 018	136 787 480	1 396 447 498
32.	Papua Barat	3 873 388 417	398 118 932	4 271 507 349	3 898 931 911	372 575 438	4 271 507 349
33.	P a p u a	7 462 044 974	779 591 449	8 241 636 423	7 239 667 120	1 001 969 303	8 241 636 423
JUMLAH/TOTAL		186 010 396 198	26 442 574 719	212 452 970 917	179 445 843 759	33 007 127 158	212 452 970 917

TABEL 1.d **ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2013**
TABLE **1.d** **RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2013**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	10 111 367 471	1 673 319 751	11 784 687 222	11 779 837 222	4 850 000	11 784 687 222
2.	Sumatera Utara	8 481 871 650	385 050 603	8 866 922 253	8 859 422 253	7 500 000	8 866 922 253
3.	Sumatera Barat	3 145 714 129	286 000 000	3 431 714 129	3 313 159 750	118 554 379	3 431 714 129
4.	R i a u	6 597 231 930	1 834 864 385	8 432 096 315	8 432 096 315	0	8 432 096 315
5.	J a m b i	2 446 374 633	206 452 219	2 652 826 852	2 652 826 852	0	2 652 826 852
6.	Sumatera Selatan	5 768 315 049	295 716 617	6 064 031 666	5 763 277 895	300 753 771	6 064 031 666
7.	Bengkulu	1 687 046 184	84 467 509	1 771 513 693	1 768 329 286	3 184 407	1 771 513 693
8.	Lampung	4 410 729 851	0	4 410 729 851	4 410 729 851	0	4 410 729 851
9.	Bangka Belitung	1 541 665 305	377 593 350	1 919 258 655	1 909 258 655	10 000 000	1 919 258 655
10.	Kepulauan Riau	2 456 886 161	213 578 625	2 670 464 786	2 554 464 786	116 000 000	2 670 464 786
11.	DKI Jakarta	41 525 336 632	8 454 553 000	49 979 889 632	45 576 328 964	4 403 560 668	49 979 889 632
12.	Jawa Barat	16 651 601 834	989 950 587	17 641 552 421	17 516 652 421	124 900 000	17 641 552 421
13.	Jawa Tengah	11 930 236 616	800 000 000	12 730 236 616	12 730 236 616	0	12 730 236 616
14.	D I Yogyakarta	2 286 855 095	213 738 934	2 500 594 029	2 454 919 429	45 674 600	2 500 594 029
15.	Jawa Timur	15 286 013 291	1 467 923 591	16 753 936 882	16 215 603 549	538 333 333	16 753 936 882
16.	Banten	5 718 700 741	364 302 500	6 083 003 241	6 052 003 241	31 000 000	6 083 003 241
17.	B a l i	3 568 392 990	783 056 121	4 351 449 111	4 316 449 111	35 000 000	4 351 449 111
18.	Nusa Tenggara Barat	2 492 621 737	17 694 889	2 510 316 626	2 488 708 881	21 607 745	2 510 316 626
19.	Nusa Tenggara Timur	2 342 342 049	118 346 207	2 460 688 256	2 400 818 256	59 870 000	2 460 688 256
20.	Kalimantan Barat	3 247 134 742	150 000 000	3 397 134 742	3 337 134 742	60 000 000	3 397 134 742
21.	Kalimantan Tengah	2 501 734 823	73 466 695	2 575 201 518	2 547 201 518	28 000 000	2 575 201 518
22.	Kalimantan Selatan	4 369 706 036	312 500 000	4 682 206 036	4 551 706 036	130 500 000	4 682 206 036
23.	Kalimantan Timur	11 500 000 000	1 500 000 000	13 000 000 000	12 900 000 000	100 000 000	13 000 000 000
24.	Sulawesi Utara	1 915 748 742	66 141 156	1 981 889 898	1 961 889 898	20 000 000	1 981 889 898
25.	Sulawesi Tengah	2 139 535 667	75 000 000	2 214 535 667	2 207 835 667	6 700 000	2 214 535 667
26.	Sulawesi Selatan	5 022 565 599	623 461 518	5 646 027 117	5 644 397 117	1 630 000	5 646 027 117
27.	Sulawesi Tenggara	1 898 244 090	183 207 183	2 081 451 273	2 039 366 273	42 085 000	2 081 451 273
28.	Gorontalo	1 038 200 990	75 600 932	1 113 801 922	1 078 801 922	35 000 000	1 113 801 922
29.	Sulawesi Barat	1 090 245 635	55 567 267	1 145 812 902	1 143 812 902	2 000 000	1 145 812 902
30.	M a l u k u	1 557 386 561	37 034 001	1 594 420 562	1 570 083 426	24 337 136	1 594 420 562
31.	Maluku Utara	1 326 441 605	100 000 000	1 426 441 605	1 403 532 605	22 909 000	1 426 441 605
32.	Papua Barat	4 253 303 028	0	4 253 303 028	4 253 303 028	0	4 253 303 028
33.	P a p u a	8 184 736 386	25 000 000	8 209 736 386	8 034 736 386	175 000 000	8 209 736 386
JUMLAH/TOTAL		198 494 287 252	21 843 587 640	220 337 874 892	213 868 924 853	6 468 950 039	220 337 874 892

TABEL

TABLE 2.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013*

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	116 802 488 665	140 001 241 096	186 010 396 198	198 494 287 252
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	56 726 589 730	73 620 310 358	86 541 912 951	92 453 182 187
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	47 300 841 241	62 759 000 075	72 996 679 774	78 814 631 481
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 454 694 720	1 408 726 470	2 645 679 139	2 304 054 954
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 933 195 176	2 524 288 765	2 642 209 423	2 882 661 633
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	6 037 858 593	6 928 295 048	8 257 344 615	8 451 834 119
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	47 519 927 639	52 779 890 539	61 998 339 390	62 149 120 827
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	17 556 536 325	16 447 715 087	21 314 535 277	17 661 435 240
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	9 896 470 197	12 508 737 244	11 969 460 145	11 538 378 740
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	19 247 315 618	22 553 282 483	27 381 818 820	31 115 928 937
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	819 605 499	1 270 155 725	1 332 525 148	1 833 377 910
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	12 555 971 296	13 601 040 199	37 470 143 857	43 891 984 238
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	16 670 537 821	20 503 199 782	26 442 574 719	21 843 587 640
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		133 473 026 486	160 504 440 878	212 452 970 917	220 337 874 892

*) Data APBD

TABEL 2.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 967 815 083	7 610 320 146	9 180 143 048	10 111 367 471
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	796 949 424	802 840 174	901 720 376	902 779 838
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	521 326 413	586 181 446	687 476 817	687 468 221
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	7 493 489	9 416 022	6 317 974	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	98 845 197	66 007 132	96 317 228	102 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	169 284 325	141 235 574	111 608 357	113 311 617
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	984 662 488	2 262 044 905	1 334 800 286	1 506 757 369
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	201 970 863	224 636 959	251 127 885	238 115 999
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	118 201 135	1 270 150 474	122 177 984	101 047 342
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	621 074 916	716 646 172	911 080 707	1 092 445 518
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	43 415 574	50 611 300	50 413 710	75 148 510
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	5 186 203 171	4 545 435 067	6 943 622 386	7 701 830 264
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 842 988 678	1 306 726 214	1 508 840 609	1 673 319 751
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		8 810 803 761	8 917 046 360	10 688 983 657	11 784 687 222

*) Data APBD

TABEL 2.2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.2 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF RECEIPT** (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 885 636 140	4 958 481 902	7 201 839 293	8 481 871 650
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 554 780 317	3 578 462 082	4 052 104 891	4 809 369 031
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 271 474 934	3 141 123 907	3 636 074 646	4 276 706 266
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	35 813 385	31 297 594	33 494 628	44 171 450
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	166 320 144	289 249 771	263 801 190	305 173 491
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	81 171 854	116 790 810	118 734 427	183 317 824
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 247 727 249	1 373 897 545	1 605 181 560	2 007 091 016
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	403 523 966	379 382 434	451 848 733	691 149 720
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 317 944	7 162 107	8 315 200	19 397 962
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	812 747 639	948 867 504	1 103 389 237	1 223 445 404
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	29 137 700	38 485 500	41 628 390	73 097 930
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	83 128 574	6 122 275	1 544 552 842	1 665 411 603
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	346 533 462	404 884 723	720 866 154	385 050 603
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		4 232 169 602	5 363 366 625	7 922 705 447	8 866 922 253

*) Data APBD

TABEL 2.3 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 920 971 383	2 071 161 196	2 922 582 140	3 145 714 129
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 006 820 947	1 147 303 770	1 225 466 023	1 303 622 243
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	768 724 373	933 800 000	994 570 032	1 055 931 634
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	28 264 854	32 331 466	38 054 666	29 460 569
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	46 814 067	80 602 797	80 348 993	91 449 876
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	163 017 653	100 569 507	112 492 332	126 780 164
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	785 574 959	897 640 879	1 143 895 852	1 271 801 566
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	103 327 542	90 617 394	183 066 225	159 056 525
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 428 657	1 609 290	9 768 542	8 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	662 403 385	764 680 895	918 560 365	1 039 922 511
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	14 415 375	40 733 300	32 500 720	64 822 530
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	128 575 477	26 216 547	553 220 265	570 290 320
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	673 887 321	335 221 212	361 250 283	286 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 594 858 704	2 406 382 408	3 283 832 423	3 431 714 129

*) Data APBD

TABEL 2.4 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	4 346 845 188	5 440 440 485	6 847 315 820	6 597 231 930
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 339 265 321	2 210 130 782	2 588 688 445	2 401 146 589
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 100 000 000	1 773 621 889	2 058 595 751	2 025 217 116
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	6 897 102	8 490 985	12 174 266	12 318 306
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	108 478 460	131 607 412	139 601 792	119 465 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	123 889 759	296 410 496	378 316 636	244 146 167
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 986 535 692	3 226 836 381	3 618 842 731	3 537 458 033
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	555 978 232	465 189 186	502 497 680	559 669 579
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 349 319 803	2 324 772 671	2 564 673 767	2 212 419 218
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	58 869 157	380 051 124	489 179 914	726 630 916
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	22 368 500	56 823 400	62 491 370	38 738 320
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	21 044 175	3 473 322	639 784 644	658 627 308
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	114 587 470	421 520 453	1 906 680 479	1 834 864 385
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		4 461 432 658	5 861 960 938	8 753 996 299	8 432 096 315

*) Data APBD

TABEL 2.5 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 640 185 858	2 078 806 913	2 654 694 237	2 446 374 633
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	686 629 362	984 232 580	995 822 608	804 414 207
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	602 355 303	838 851 529	808 258 461	672 437 580
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	43 609 629	10 195 268	12 053 725	12 510 183
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 443 520	21 703 149	29 984 606	28 606 827
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	28 220 910	113 482 634	145 525 816	90 859 617
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	932 205 660	1 075 207 719	1 332 579 087	1 299 932 736
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	157 838 823	165 268 384	217 355 132	172 944 075
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	265 593 366	301 321 322	350 162 175	239 374 809
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	488 743 471	583 882 413	731 952 242	836 578 062
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	20 030 000	24 735 600	33 109 538	51 035 790
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	21 350 836	19 366 614	326 292 542	342 027 690
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	201 204 877	353 260 385	632 401 128	206 452 219
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 841 390 735	2 432 067 298	3 287 095 365	2 652 826 852

*) Data APBD

TABEL 2.6 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.6 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 224 159 595	3 963 984 966	5 223 884 081	5 768 315 049
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 371 083 868	1 849 119 912	2 001 739 389	2 287 016 036
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 226 712 548	1 671 518 572	1 803 818 849	1 994 720 400
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	17 747 278	11 682 782	13 376 825	16 565 200
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	61 183 357	78 956 548	85 892 644	145 043 436
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	65 440 685	86 962 010	98 651 071	130 687 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 823 059 237	1 992 557 000	2 378 798 651	2 644 842 763
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	431 004 842	379 632 596	490 241 630	558 070 090
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	862 163 718	933 824 103	1 127 002 330	1 191 067 506
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	512 083 577	646 813 301	716 153 261	870 516 767
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	17 807 100	32 287 000	45 401 430	25 188 400
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	30 016 490	122 308 054	843 346 041	836 456 250
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	315 250 644	390 314 822	477 175 785	295 716 617
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 539 410 239	4 354 299 788	5 701 059 866	6 064 031 666

*) Data APBD

TABEL 2.7 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.7 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 000 860 633	1 166 982 246	1 562 525 395	1 687 046 184
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	351 091 488	440 928 213	483 768 275	507 999 015
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	259 804 030	333 103 966	370 247 703	393 560 043
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	59 610 610	6 590 792	7 655 853	8 830 386
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	10 895 322	12 488 395	7 636 009	12 146 443
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	20 781 526	88 745 060	98 228 710	93 462 143
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	598 799 426	712 256 295	882 996 673	971 418 249
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	52 026 355	18 519 664	61 848 269	55 257 593
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 747 881	49 738 995	17 216 628	9 925 498
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	523 041 290	607 388 036	775 311 166	854 647 828
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	20 983 900	36 609 600	28 620 610	51 587 330
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	50 969 719	13 797 738	195 760 447	207 628 920
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	10 570 146	39 678 718	197 339 471	84 467 509
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 011 430 779	1 206 660 964	1 759 864 866	1 771 513 693

*) Data APBD

TABEL 2.8 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 091 684 131	2 527 990 902	3 742 004 283	4 410 729 851
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 118 340 908	1 395 675 721	1 687 701 199	2 183 413 479
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	951 316 481	1 199 945 831	1 465 711 124	1 667 107 700
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	7 159 463	8 689 231	8 209 834	8 339 099
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 869 366	19 398 638	21 270 704	23 549 585
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	146 995 598	167 642 021	192 509 537	484 417 095
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	908 420 168	1 063 287 255	1 280 851 522	1 421 737 554
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	130 179 866	126 734 977	164 927 667	170 265 582
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	107 290 368	124 369 040	145 696 928	130 700 559
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	643 376 134	769 973 038	939 139 287	1 060 663 183
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	27 573 800	42 210 200	31 087 640	60 108 230
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	64 923 055	69 027 926	773 451 562	805 578 818
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	79 029 066	161 181 629	117 688 684	0
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 170 713 197	2 689 172 531	3 859 692 967	4 410 729 851

*) Data APBD

TABEL 2.9 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.9 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	848 025 113	1 193 497 245	1 384 937 385	1 541 665 305
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	328 122 025	459 208 310	438 373 573	465 931 501
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	296 214 789	418 338 202	396 527 427	427 503 934
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	2 628 024	3 565 501	3 689 016	3 107 340
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	3 077 328	4 016 266	7 193 086	5 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	26 201 884	33 288 341	30 964 044	30 320 227
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	519 288 576	700 510 364	821 499 996	933 756 954
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	52 057 507	55 995 923	63 591 599	65 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	48 516 961	145 043 626	98 684 932	107 446 266
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	410 642 308	481 589 915	634 087 815	717 140 118
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	8 071 800	17 880 900	25 135 650	44 170 570
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	614 512	33 778 571	125 063 816	141 976 850
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	264 129 736	240 432 353	242 123 559	377 593 350
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 112 154 849	1 433 929 598	1 627 060 944	1 919 258 655

*) Data APBD

TABEL 2.10 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 853 589 773	1 876 879 092	2 473 411 609	2 456 886 161
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	522 006 644	620 901 422	723 053 960	632 816 186
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	493 565 569	572 738 970	685 601 565	597 241 828
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	1 475 997	1 655 565	5 352 202	1 870 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	26 965 078	46 506 887	32 100 193	33 704 358
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 310 792 978	1 246 904 170	1 594 446 909	1 635 850 472
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	234 376 006	217 469 127	1 110 423 502	220 775 139
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	761 696 229	611 786 301	0	722 334 793
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	310 161 843	395 745 542	460 857 807	656 067 630
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	4 558 900	21 903 200	23 165 600	36 672 910
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	20 790 151	9 073 500	155 910 740	188 219 503
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	242 173 799	375 005 362	290 737 799	213 578 625
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 095 763 572	2 251 884 454	2 764 149 408	2 670 464 786

*) Data APBD

TABEL 2.11 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.11 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	23 025 986 993	28 297 361 175	35 379 180 052	41 525 336 632
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	12 891 992 182	17 825 986 987	22 040 801 448	26 670 448 766
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	10 751 745 151	15 221 249 846	17 721 493 016	21 918 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	439 210 908	609 349 051	1 820 435 448	1 500 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	223 005 616	278 789 768	351 823 211	415 240 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 478 030 507	1 716 598 322	2 147 049 773	2 837 208 766
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	9 537 609 058	9 149 708 963	11 554 964 808	9 248 954 435
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	9 398 613 244	8 747 636 170	10 984 787 700	8 732 252 723
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	138 995 814	192 163 351	294 849 251	215 519 246
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	0	209 909 442	275 327 857	301 182 466
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	596 385 753	1 321 665 225	1 783 413 796	5 605 933 431
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	3 748 512 147	4 926 078 266	6 475 552 012	8 454 553 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		26 774 499 140	33 223 439 441	41 854 732 064	49 979 889 632

*) Data APBD

TABEL 2.12 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**
TABLE 2.12 **(ribu rupiah), 2010-2013**
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	9 742 187 781	11 053 859 588	16 878 128 995	16 651 601 834
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	7 252 242 913	8 502 643 155	9 982 917 415	9 882 025 240
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	6 470 866 063	7 696 484 754	9 149 214 330	9 142 139 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	32 248 950	50 737 863	57 326 324	57 327 135
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	226 365 880	229 147 336	232 647 377	240 148 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	522 762 020	526 273 202	543 729 384	442 411 105
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 427 857 461	2 526 078 027	2 832 746 609	2 583 041 105
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	1 113 053 612	999 708 518	1 199 350 816	849 993 594
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	190 109 609	299 051 801	315 078 753	180 522 450
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 086 123 940	1 181 553 108	1 269 960 760	1 472 453 011
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 570 300	45 764 600	48 356 280	80 072 050
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	62 087 407	25 138 406	4 062 464 971	4 186 535 489
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 789 756 684	2 449 742 872	3 003 186 559	989 950 587
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		11 531 944 465	13 503 602 460	19 881 315 554	17 641 552 421

*) Data APBD

TABEL 2.13 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN**
TABLE 2.13 **(ribu rupiah), 2010-2013**
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 626 316 989	7 547 669 804	11 694 479 699	11 930 236 616
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	4 785 133 227	5 564 233 152	6 629 308 010	6 625 624 955
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	3 893 699 996	4 599 046 987	5 590 597 156	5 483 987 700
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	127 651 269	64 549 242	68 250 252	74 381 172
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	195 631 744	211 976 159	238 231 933	252 770 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	568 150 218	688 660 764	732 228 669	814 486 083
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 811 657 949	1 950 189 365	2 318 806 100	2 420 344 820
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	604 154 702	511 527 047	610 215 375	666 962 941
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	10 411 240	110 692 295	141 067 324	0
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 168 787 757	1 276 180 223	1 516 892 951	1 670 859 369
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	28 304 250	51 789 800	50 630 450	82 522 510
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	29 525 813	33 247 287	2 746 365 589	2 884 266 841
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	904 356 288	1 239 075 792	707 735 960	800 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		7 530 673 277	8 786 745 596	12 402 215 659	12 730 236 616

*) Data APBD

TABEL 2.14 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.14 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 374 205 096	1 604 910 831	2 171 734 308	2 286 855 095
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	740 202 076	867 112 885	1 004 063 126	1 014 089 544
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	634 710 019	735 226 106	871 630 605	885 217 610
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	34 116 476	35 985 658	34 115 158	41 436 704
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	26 333 870	28 961 383	35 492 533	36 328 244
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	45 041 711	66 939 738	62 824 830	51 106 986
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	626 677 339	722 339 653	894 544 325	961 190 993
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	87 816 512	75 967 202	112 691 591	92 828 719
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 480	6 070 523	5 743 298	5 531 606
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	527 471 247	620 812 328	757 056 696	828 334 768
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	11 384 100	19 489 600	19 052 740	34 495 900
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	7 325 681	15 458 293	273 126 857	311 574 558
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	256 568 355	254 231 964	293 608 593	213 738 934
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 630 773 451	1 859 142 795	2 465 342 901	2 500 594 029

*) Data APBD

TABEL 2.15 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	9 980 544 750	11 493 375 583	15 543 039 549	15 286 013 291
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	7 478 530 080	8 898 616 683	9 725 627 569	9 523 901 968
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	5 907 320 403	7 298 242 129	7 816 590 831	7 863 719 634
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	66 237 597	66 359 751	118 823 638	126 405 756
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	243 826 826	365 149 165	352 899 912	328 891 596
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 261 145 254	1 168 865 638	1 437 313 188	1 204 884 982
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 445 304 862	2 528 086 450	3 069 016 102	2 895 842 710
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	1 165 084 944	1 110 351 896	1 507 072 635	1 163 286 193
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	10 302 953	15 201 655	16 892 271	14 263 800
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 212 934 765	1 347 501 699	1 491 561 136	1 632 648 287
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	56 982 200	55 031 200	53 490 060	85 644 430
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	56 709 808	66 672 450	2 748 395 878	2 866 268 613
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 995 753 452	1 564 783 382	1 359 475 042	1 467 923 591
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		11 976 298 202	13 058 158 965	16 902 514 591	16 753 936 882

*) Data APBD

TABEL 2.16 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 139 437 626	3 755 614 332	5 413 705 184	5 718 700 741
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 321 586 438	2 895 569 551	3 395 883 044	3 577 954 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 208 083 478	2 769 882 159	3 257 728 615	3 460 435 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	3 207 707	3 780 186	6 418 728	6 109 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	37 874 447	31 532 942	32 293 949	36 460 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	72 420 806	90 374 264	99 441 752	74 950 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	812 654 174	849 490 704	1 015 105 168	1 088 577 051
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	416 150 982	341 626 487	451 137 610	455 001 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	863 573	2 300 934	3 446 980	2 360 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	381 979 019	460 383 683	530 833 378	617 081 101
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	13 660 600	45 179 600	29 687 200	14 134 950
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	5 197 014	10 554 077	1 002 716 972	1 052 169 690
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	235 495 508	535 848 290	374 844 507	364 302 500
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 374 933 134	4 291 462 622	5 788 549 691	6 083 003 241

*) Data APBD

TABEL 2.17 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.17 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 237 707 339	2 662 077 116	3 633 133 585	3 568 392 990
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 393 730 257	1 723 617 736	2 042 091 096	1 930 000 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 221 182 092	1 496 933 887	1 813 341 219	1 751 569 720
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	20 940 232	33 541 288	50 545 903	13 336 054
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	60 788 386	70 314 131	76 701 656	79 211 277
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	90 819 547	122 828 430	101 502 318	85 882 949
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	649 257 693	705 288 133	908 371 147	928 192 014
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	150 963 833	128 698 319	180 266 157	91 990 758
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	0	0	0
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	489 942 535	560 673 539	694 079 080	792 365 876
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	8 351 325	15 916 275	34 025 910	43 835 380
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	194 719 389	233 171 247	682 671 342	710 200 976
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	538 452 871	704 385 153	787 311 641	783 056 121
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 776 160 210	3 366 462 269	4 420 445 226	4 351 449 111

*) Data APBD

TABEL 2.18 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 272 218 059	1 689 351 249	2 242 817 129	2 492 621 737
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	515 340 957	741 291 175	745 979 811	802 468 769
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	391 690 342	506 909 926	580 615 755	612 034 685
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	54 900 839	59 564 965	10 129 108	15 456 170
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	40 937 455	135 639 075	53 821 736	68 165 340
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	27 812 321	39 177 209	101 413 212	106 812 574
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	756 256 439	855 310 099	1 054 470 183	1 187 576 718
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	112 925 607	131 498 518	169 222 739	210 658 204
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	45 501 002	31 176 098	22 303 389	60 157 798
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	573 065 430	646 671 083	809 617 715	859 353 026
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	24 764 400	45 964 400	53 326 340	57 407 690
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	620 663	92 749 975	442 367 135	502 576 250
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	73 514 841	17 280 030	17 713 224	17 694 889
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 345 732 900	1 706 631 279	2 260 530 353	2 510 316 626

*) Data APBD

TABEL 2.19 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 088 071 459	1 324 470 172	2 241 542 051	2 342 342 049
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	298 154 337	391 828 733	459 657 187	433 414 404
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	195 007 612	266 729 264	315 287 237	295 487 939
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	47 973 591	10 446 385	9 850 009	11 269 064
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	19 826 431	33 862 764	42 740 305	45 050 160
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	35 346 703	80 790 320	91 779 636	81 607 241
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	773 795 618	887 291 439	1 098 619 869	1 187 410 550
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	68 647 419	86 798 049	100 345 548	105 220 898
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	263 132	1 036 546	538 607	375 289
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	674 635 569	752 057 444	940 646 764	1 003 991 703
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	30 249 498	47 399 400	57 088 950	77 822 660
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	16 121 504	45 350 000	683 264 995	721 517 095
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	224 112 521	120 234 844	188 710 799	118 346 207
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 312 183 980	1 444 705 016	2 430 252 850	2 460 688 256

*) Data APBD

TABEL 2.20 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.20 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 778 927 314	2 202 217 037	2 932 912 821	3 247 134 742
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	777 243 196	1 080 456 052	1 164 425 412	1 346 875 702
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	620 608 802	901 500 403	986 813 358	1 152 304 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	78 579 088	84 659 762	89 055 036	110 656 328
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	35 202 158	40 348 020	47 620 148	50 460 829
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	42 853 148	53 947 867	40 936 870	33 454 545
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	920 636 282	1 037 860 159	1 249 834 007	1 359 685 230
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	127 979 083	126 761 996	154 586 920	122 300 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	7 915 306	27 244 775	28 104 240	18 500 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	755 123 093	845 483 888	1 023 229 807	1 144 712 840
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	29 618 800	38 369 500	43 913 040	74 172 390
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	81 047 836	83 900 826	518 653 402	540 573 810
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	173 009 098	231 734 083	383 302 411	150 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 951 936 412	2 433 951 120	3 316 215 232	3 397 134 742

*) Data APBD

TABEL 2.21 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.21 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 555 426 286	1 921 944 863	2 514 031 289	2 501 734 823
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	504 217 391	815 244 765	945 362 708	874 484 773
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	416 518 895	707 444 895	836 503 945	770 525 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	25 282 312	6 493 504	6 963 110	6 346 800
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	17 303 860	19 942 191	22 159 324	21 115 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	45 112 324	81 364 175	79 736 329	76 497 973
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	921 225 167	1 083 088 116	1 296 011 128	1 375 916 250
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	129 086 986	138 131 347	163 501 928	138 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	51 961 488	97 225 434	131 068 852	112 100 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	707 880 493	795 816 335	951 256 068	1 062 516 940
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	32 296 200	51 915 000	50 184 280	63 299 310
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	129 983 728	23 611 982	272 657 453	251 333 800
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	57 885 383	132 100 592	451 605 920	73 466 695
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 613 311 669	2 054 045 455	2 965 637 209	2 575 201 518

*) Data APBD

TABEL 2.22 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.22 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 279 776 309	3 148 042 882	4 381 610 479	4 369 706 036
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 286 258 612	1 868 595 794	2 517 518 566	2 751 769 966
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 088 346 425	1 643 513 495	2 199 594 030	2 481 325 311
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	41 660 161	41 134 809	9 275 042	7 069 118
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	8 388 793	53 898	42 309 263	43 528 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	147 863 233	183 893 592	266 340 231	219 847 537
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	930 124 574	1 195 565 014	1 534 463 778	1 270 214 981
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	142 683 191	133 959 403	196 743 601	137 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	309 529 316	519 483 059	646 336 615	408 150 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	458 074 767	504 876 152	652 535 312	683 511 441
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	19 837 300	37 246 400	38 848 250	41 553 540
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	63 393 123	83 882 074	329 628 135	347 721 089
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	492 660 308	324 878 615	933 954 408	312 500 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 772 436 617	3 472 921 497	5 315 564 887	4 682 206 036

*) Data APBD

TABEL 2.23 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.23 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7 044 556 875	9 817 099 927	11 886 470 505	11 500 000 000
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 714 815 547	4 501 210 028	5 409 949 386	5 120 712 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 023 934 390	3 679 366 875	4 486 404 585	4 379 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	10 787 074	13 699 032	22 495 632	13 849 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	137 612 246	215 652 587	208 293 801	222 482 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	542 481 837	592 491 534	692 755 368	505 381 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	4 308 464 375	5 295 875 915	6 071 586 086	5 963 674 900
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	653 810 498	688 989 457	715 648 111	820 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 620 846 163	4 517 251 513	5 268 684 084	5 080 087 723
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	164 514	51 446 845	52 637 761	55 539 337
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	33 643 200	38 188 100	34 616 130	8 047 840
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	21 276 953	20 013 984	404 935 033	415 613 100
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	808 568 904	1 652 437 549	2 837 723 895	1 500 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		7 853 125 779	11 469 537 476	14 724 194 400	13 000 000 000

*) Data APBD

TABEL 2.24 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF RECEIPT*
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 158 671 349	1 365 705 444	1 834 908 288	1 915 748 742
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	418 737 661	535 087 975	633 650 533	650 063 465
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	373 765 054	477 202 211	554 846 121	579 563 465
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	11 933 613	8 866 084	14 790 121	16 800 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	13 553 666	23 107 361	24 433 971	30 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	19 485 328	25 912 319	39 580 320	23 700 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	650 530 096	729 361 142	933 366 697	1 010 030 417
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	73 405 246	67 711 925	92 316 876	69 800 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	904 637	12 650 010	6 975 400	200 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	558 781 013	619 711 007	790 534 491	885 684 277
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	17 439 200	29 288 200	43 539 930	54 346 140
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	89 403 592	101 256 327	267 891 058	255 654 860
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	347 025 574	109 273 479	189 114 090	66 141 156
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 505 696 923	1 474 978 923	2 024 022 378	1 981 889 898

*) Data APBD

TABEL 2.25 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 177 609 898	1 410 593 609	1 962 393 167	2 139 535 667
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	411 797 140	519 974 416	605 821 437	611 928 146
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	344 354 728	421 221 594	494 753 016	542 365 016
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	29 650 214	14 058 850	3 123 783	2 756 277
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	11 384 015	17 796 093	5 474 894	19 932 067
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	26 408 183	66 897 879	102 469 744	46 874 786
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	759 172 265	864 098 666	1 042 926 565	1 158 370 880
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	69 360 924	73 268 339	83 175 645	84 799 541
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 883 270	9 489 468	14 426 121	12 963 304
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	659 331 271	743 161 759	902 087 729	994 658 685
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	28 596 800	38 179 100	43 237 070	65 949 350
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	6 640 493	26 520 527	313 645 165	369 236 641
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	177 052 220	220 705 398	209 216 673	75 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 354 662 118	1 631 299 007	2 171 609 840	2 214 535 667

*) Data APBD

TABEL 2.26 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.26 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 564 075 935	3 110 566 841	4 433 963 020	5 022 565 599
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 545 589 709	1 959 515 902	2 198 776 396	2 587 845 795
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 334 804 021	1 729 075 998	1 949 194 027	2 333 128 033
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	108 560 877	111 625 000	113 058 779	65 414 587
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	51 551 621	62 366 615	67 557 465	66 787 175
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	50 673 190	56 448 289	68 966 125	122 516 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	959 942 494	1 106 989 189	1 349 192 581	1 457 675 124
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	217 385 913	230 606 605	299 680 577	288 650 410
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	7 003 880	17 738 615	9 797 950	14 988 936
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	706 276 399	816 757 969	996 939 584	1 089 771 438
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	29 276 302	41 886 000	42 774 470	64 264 340
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	58 543 732	44 061 750	885 994 043	977 044 680
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	230 448 199	290 514 746	212 338 656	623 461 518
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 794 524 134	3 401 081 587	4 646 301 676	5 646 027 117

*) Data APBD

TABEL 2.27 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 2.27 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 055 173 630	1 288 979 728	1 811 984 328	1 898 244 090
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	339 360 819	346 169 831	439 184 125	417 111 453
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	202 929 981	262 509 202	336 932 584	327 808 483
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	51 035 765	18 543 870	19 160 705	17 860 310
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	14 103 892	13 488 191	25 046 620	25 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	71 291 181	51 628 568	58 044 216	46 442 660
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	691 637 811	817 385 234	1 020 125 146	1 123 896 137
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	64 736 445	64 314 517	69 714 283	70 504 626
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	7 106 547	18 429 560	45 493 192	19 089 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	595 762 419	700 836 557	870 257 871	981 035 741
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	24 032 400	33 804 600	34 659 800	53 266 770
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	24 175 000	125 424 663	352 675 057	357 236 500
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	106 197 607	198 733 017	23 590 982	183 207 183
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 161 371 237	1 487 712 745	1 835 575 310	2 081 451 273

*) Data APBD

TABEL 2.28 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	593 415 093	697 576 031	933 169 935	1 038 200 990
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	133 147 652	158 083 317	180 039 376	190 742 155
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	120 748 491	144 751 936	168 068 662	176 259 293
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	0	0	88 420	275 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	12 399 161	13 331 381	11 882 294	14 207 862
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	438 419 416	515 369 177	637 007 089	725 527 945
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	26 766 048	26 066 409	30 667 268	30 033 261
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	167 648	127 466	191 189	196 893
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	400 750 820	461 118 102	582 140 302	652 284 261
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	10 734 900	28 057 200	24 008 330	43 013 530
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	21 848 025	24 123 537	116 123 470	121 930 890
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	65 070 534	96 844 215	63 968 779	75 600 932
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		658 485 627	794 420 246	997 138 714	1 113 801 922

*) Data APBD

TABEL 2.29 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan Kind of Receipt	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	610 378 110	718 871 064	959 029 569	1 090 245 635
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	90 207 582	114 310 885	140 396 940	163 935 066
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	78 352 878	96 383 467	119 939 739	120 322 490
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	1 908 405	2 041 884	1 422 265	4 529 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	2 522	25 406	0	1 508 193
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	9 943 777	15 860 128	19 034 936	37 575 383
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	456 339 988	512 742 098	671 146 618	769 834 364
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	32 835 423	34 885 738	43 462 087	35 732 431
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	222 988	416 862	217 890	1 587 341
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	405 749 577	441 578 798	590 680 361	685 497 592
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	17 532 000	35 860 700	36 786 280	47 017 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	63 830 540	91 818 081	147 486 011	156 476 205
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	23 221 030	25 751 453	19 000 000	55 567 267
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		633 599 140	744 622 517	978 029 569	1 145 812 902

*) Data APBD

TABEL 2.30 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN**
TABLE (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF RECEIPT
 (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	952 660 802	1 138 187 347	1 436 645 207	1 557 386 561
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	169 568 947	221 882 123	267 502 524	296 575 978
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	116 396 548	164 845 694	204 292 148	202 110 704
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	25 304 142	25 426 006	25 576 587	38 487 624
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	17 061 249	17 190 530	19 133 252	42 300 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	10 807 008	14 419 893	18 500 537	13 677 650
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	715 451 154	828 272 878	959 240 295	1 042 228 713
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	72 048 913	75 254 690	82 945 042	84 172 529
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 058 590	4 366 535	8 741 099	6 974 112
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	607 572 176	703 993 953	829 491 474	897 657 192
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	32 771 475	44 657 700	38 062 680	53 424 880
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	67 640 701	88 032 346	209 902 388	218 581 870
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	58 385 591	55 485 451	78 105 094	37 034 001
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 011 046 393	1 193 672 798	1 514 750 301	1 594 420 562

*) Data APBD

TABEL 2.31 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN**
TABLE 2.31 **(ribu rupiah), 2010-2013**
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	695 828 538	936 792 069	1 196 746 356	1 326 441 605
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	77 842 743	84 811 588	115 905 322	132 761 883
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	61 999 098	76 653 533	91 735 153	96 086 411
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	10 542 401	3 921 064	7 201 989	24 266 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	76 190	65 943	73 140	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	5 225 054	4 171 048	16 895 040	12 409 472
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	604 964 763	691 007 327	858 295 011	956 831 062
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	69 097 630	67 685 366	66 657 071	73 100 425
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	30 000 369	31 698 350	50 620 895	41 451 095
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	479 480 664	540 389 811	703 159 025	772 591 162
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	26 386 100	51 233 800	37 858 020	69 688 380
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	13 021 032	160 973 154	222 546 023	236 848 660
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	2 872 955	15 732 309	199 701 142	100 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		698 701 493	952 524 378	1 396 447 498	1 426 441 605

*) Data APBD

TABEL 2.32 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 407 802 988	3 699 884 166	3 873 388 417	4 253 303 028
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	125 774 327	152 163 909	175 450 133	142 245 844
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	99 847 508	119 509 796	142 529 273	117 034 200
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	1 091 318	1 137 679	1 420 766	950 450
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 096 715	4 961 194	8 809 755	4 961 194
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	23 738 786	26 555 240	22 690 339	19 300 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 462 347 938	1 483 865 431	1 516 156 701	1 700 888 450
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	184 845 998	193 485 191	191 649 305	166 750 032
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	649 958 976	549 396 430	384 475 833	404 334 671
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	605 786 464	700 444 910	901 398 453	1 064 872 637
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	21 756 500	40 538 900	38 633 110	64 931 110
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 819 680 723	2 063 854 826	2 181 781 583	2 410 168 734
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	129 160 000	353 183 633	398 118 932	0
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 536 962 988	4 053 067 799	4 271 507 349	4 253 303 028

*) Data APBD

TABEL 2.33 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	5 661 736 549	6 227 545 145	7 462 044 974	8 184 736 386
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	380 025 633	363 100 750	623 162 648	407 694 190
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	252 434 826	275 091 606	401 691 994	326 313 065
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	21 171 950	18 889 331	15 773 347	11 900 872
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	30 340 833	19 887 905	22 598 926	19 887 900
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	76 078 024	49 231 908	183 098 381	49 592 353
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 762 534 290	1 893 484 847	2 118 450 110	2 502 569 266
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	252 799 170	269 335 254	311 768 070	282 092 653
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	286 182 154	275 748 035	130 708 426	197 311 523
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 148 497 966	1 276 285 908	1 569 782 444	1 889 267 850
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	75 055 000	72 115 650	106 191 170	133 897 240
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 519 176 626	3 970 959 548	4 720 432 216	5 274 472 930
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	142 102 552	955 938 778	779 591 449	25 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 803 839 101	7 183 483 923	8 241 636 423	8 209 736 386

*) Data APBD

TABEL

TABLE 3.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 3.A REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 967 815 083	7 610 320 146	9 180 143 048	10 111 367 471
2.	Sumatera Utara	3 885 636 140	4 958 481 902	7 201 839 293	8 481 871 650
3.	Sumatera Barat	1 920 971 383	2 071 161 196	2 922 582 140	3 145 714 129
4.	R i a u	4 346 845 188	5 440 440 485	6 847 315 820	6 597 231 930
5.	J a m b i	1 640 185 858	2 078 806 913	2 654 694 237	2 446 374 633
6.	Sumatera Selatan	3 224 159 595	3 963 984 966	5 223 884 081	5 768 315 049
7.	Bengkulu	1 000 860 633	1 166 982 246	1 562 525 395	1 687 046 184
8.	Lampung	2 091 684 131	2 527 990 902	3 742 004 283	4 410 729 851
9.	Bangka Belitung	848 025 113	1 193 497 245	1 384 937 385	1 541 665 305
10.	Kepulauan Riau	1 853 589 773	1 876 879 092	2 473 411 609	2 456 886 161
11.	DKI Jakarta	23 025 986 993	28 297 361 175	35 379 180 052	41 525 336 632
12.	Jawa Barat	9 742 187 781	11 053 859 588	16 878 128 995	16 651 601 834
13.	Jawa Tengah	6 626 316 989	7 547 669 804	11 694 479 699	11 930 236 616
14.	D I Yogyakarta	1 374 205 096	1 604 910 831	2 171 734 308	2 286 855 095
15.	Jawa Timur	9 980 544 750	11 493 375 583	15 543 039 549	15 286 013 291
16.	Banten	3 139 437 626	3 755 614 332	5 413 705 184	5 718 700 741
17.	B a l i	2 237 707 339	2 662 077 116	3 633 133 585	3 568 392 990
18.	Nusa Tenggara Barat	1 272 218 059	1 689 351 249	2 242 817 129	2 492 621 737
19.	Nusa Tenggara Timur	1 088 071 459	1 324 470 172	2 241 542 051	2 342 342 049
20.	Kalimantan Barat	1 778 927 314	2 202 217 037	2 932 912 821	3 247 134 742
21.	Kalimantan Tengah	1 555 426 286	1 921 944 863	2 514 031 289	2 501 734 823
22.	Kalimantan Selatan	2 279 776 309	3 148 042 882	4 381 610 479	4 369 706 036
23.	Kalimantan Timur	7 044 556 875	9 817 099 927	11 886 470 505	11 500 000 000
24.	Sulawesi Utara	1 158 671 349	1 365 705 444	1 834 908 288	1 915 748 742
25.	Sulawesi Tengah	1 177 609 898	1 410 593 609	1 962 393 167	2 139 535 667
26.	Sulawesi Selatan	2 564 075 935	3 110 566 841	4 433 963 020	5 022 565 599
27.	Sulawesi Tenggara	1 055 173 630	1 288 979 728	1 811 984 328	1 898 244 090
28.	Gorontalo	593 415 093	697 576 031	933 169 935	1 038 200 990
29.	Sulawesi Barat	610 378 110	718 871 064	959 029 569	1 090 245 635
30.	M a l u k u	952 660 802	1 138 187 347	1 436 645 207	1 557 386 561
31.	Maluku Utara	695 828 538	936 792 069	1 196 746 356	1 326 441 605
32.	Papua Barat	3 407 802 988	3 699 884 166	3 873 388 417	4 253 303 028
33.	P a p u a	5 661 736 549	6 227 545 145	7 462 044 974	8 184 736 386
JUMLAH/TOTAL		116 802 488 665	140 001 241 096	186 010 396 198	198 494 287 252

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2010-2013**
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	796 949 424	802 840 174	901 720 376	902 779 838
2.	Sumatera Utara	2 554 780 317	3 578 462 082	4 052 104 891	4 809 369 031
3.	Sumatera Barat	1 006 820 947	1 147 303 770	1 225 466 023	1 303 622 243
4.	R i a u	1 339 265 321	2 210 130 782	2 588 688 445	2 401 146 589
5.	J a m b i	686 629 362	984 232 580	995 822 608	804 414 207
6.	Sumatera Selatan	1 371 083 868	1 849 119 912	2 001 739 389	2 287 016 036
7.	Bengkulu	351 091 488	440 928 213	483 768 275	507 999 015
8.	Lampung	1 118 340 908	1 395 675 721	1 687 701 199	2 183 413 479
9.	Bangka Belitung	328 122 025	459 208 310	438 373 573	465 931 501
10.	Kepulauan Riau	522 006 644	620 901 422	723 053 960	632 816 186
11.	DKI Jakarta	12 891 992 182	17 825 986 987	22 040 801 448	26 670 448 766
12.	Jawa Barat	7 252 242 913	8 502 643 155	9 982 917 415	9 882 025 240
13.	Jawa Tengah	4 785 133 227	5 564 233 152	6 629 308 010	6 625 624 955
14.	D I Yogyakarta	740 202 076	867 112 885	1 004 063 126	1 014 089 544
15.	Jawa Timur	7 478 530 080	8 898 616 683	9 725 627 569	9 523 901 968
16.	Banten	2 321 586 438	2 895 569 551	3 395 883 044	3 577 954 000
17.	B a l i	1 393 730 257	1 723 617 736	2 042 091 096	1 930 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	515 340 957	741 291 175	745 979 811	802 468 769
19.	Nusa Tenggara Timur	298 154 337	391 828 733	459 657 187	433 414 404
20.	Kalimantan Barat	777 243 196	1 080 456 052	1 164 425 412	1 346 875 702
21.	Kalimantan Tengah	504 217 391	815 244 765	945 362 708	874 484 773
22.	Kalimantan Selatan	1 286 258 612	1 868 595 794	2 517 518 566	2 751 769 966
23.	Kalimantan Timur	2 714 815 547	4 501 210 028	5 409 949 386	5 120 712 000
24.	Sulawesi Utara	418 737 661	535 087 975	633 650 533	650 063 465
25.	Sulawesi Tengah	411 797 140	519 974 416	605 821 437	611 928 146
26.	Sulawesi Selatan	1 545 589 709	1 959 515 902	2 198 776 396	2 587 845 795
27.	Sulawesi Tenggara	339 360 819	346 169 831	439 184 125	417 111 453
28.	Gorontalo	133 147 652	158 083 317	180 039 376	190 742 155
29.	Sulawesi Barat	90 207 582	114 310 885	140 396 940	163 935 066
30.	M a l u k u	169 568 947	221 882 123	267 502 524	296 575 978
31.	Maluku Utara	77 842 743	84 811 588	115 905 322	132 761 883
32.	Papua Barat	125 774 327	152 163 909	175 450 133	142 245 844
33.	P a p u a	380 025 633	363 100 750	623 162 648	407 694 190
JUMLAH/TOTAL		56 726 589 730	73 620 310 358	86 541 912 951	92 453 182 187

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.1

**REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2010-2013**
**ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	521 326 413	586 181 446	687 476 817	687 468 221
2.	Sumatera Utara	2 271 474 934	3 141 123 907	3 636 074 646	4 276 706 266
3.	Sumatera Barat	768 724 373	933 800 000	994 570 032	1 055 931 634
4.	R i a u	1 100 000 000	1 773 621 889	2 058 595 751	2 025 217 116
5.	J a m b i	602 355 303	838 851 529	808 258 461	672 437 580
6.	Sumatera Selatan	1 226 712 548	1 671 518 572	1 803 818 849	1 994 720 400
7.	Bengkulu	259 804 030	333 103 966	370 247 703	393 560 043
8.	Lampung	951 316 481	1 199 945 831	1 465 711 124	1 667 107 700
9.	Bangka Belitung	296 214 789	418 338 202	396 527 427	427 503 934
10.	Kepulauan Riau	493 565 569	572 738 970	685 601 565	597 241 828
11.	DKI Jakarta	10 751 745 151	15 221 249 846	17 721 493 016	21 918 000 000
12.	Jawa Barat	6 470 866 063	7 696 484 754	9 149 214 330	9 142 139 000
13.	Jawa Tengah	3 893 699 996	4 599 046 987	5 590 597 156	5 483 987 700
14.	D I Yogyakarta	634 710 019	735 226 106	871 630 605	885 217 610
15.	Jawa Timur	5 907 320 403	7 298 242 129	7 816 590 831	7 863 719 634
16.	Banten	2 208 083 478	2 769 882 159	3 257 728 615	3 460 435 000
17.	B a l i	1 221 182 092	1 496 933 887	1 813 341 219	1 751 569 720
18.	Nusa Tenggara Barat	391 690 342	506 909 926	580 615 755	612 034 685
19.	Nusa Tenggara Timur	195 007 612	266 729 264	315 287 237	295 487 939
20.	Kalimantan Barat	620 608 802	901 500 403	986 813 358	1 152 304 000
21.	Kalimantan Tengah	416 518 895	707 444 895	836 503 945	770 525 000
22.	Kalimantan Selatan	1 088 346 425	1 643 513 495	2 199 594 030	2 481 325 311
23.	Kalimantan Timur	2 023 934 390	3 679 366 875	4 486 404 585	4 379 000 000
24.	Sulawesi Utara	373 765 054	477 202 211	554 846 121	579 563 465
25.	Sulawesi Tengah	344 354 728	421 221 594	494 753 016	542 365 016
26.	Sulawesi Selatan	1 334 804 021	1 729 075 998	1 949 194 027	2 333 128 033
27.	Sulawesi Tenggara	202 929 981	262 509 202	336 932 584	327 808 483
28.	Gorontalo	120 748 491	144 751 936	168 068 662	176 259 293
29.	Sulawesi Barat	78 352 878	96 383 467	119 939 739	120 322 490
30.	M a l u k u	116 396 548	164 845 694	204 292 148	202 110 704
31.	Maluku Utara	61 999 098	76 653 533	91 735 153	96 086 411
32.	Papua Barat	99 847 508	119 509 796	142 529 273	117 034 200
33.	P a p u a	252 434 826	275 091 606	401 691 994	326 313 065
JUMLAH/TOTAL		47 300 841 241	62 759 000 075	72 996 679 774	78 814 631 481

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.2

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM RETRIBUTIONS THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	7 493 489	9 416 022	6 317 974	0
2.	Sumatera Utara	35 813 385	31 297 594	33 494 628	44 171 450
3.	Sumatera Barat	28 264 854	32 331 466	38 054 666	29 460 569
4.	R i a u	6 897 102	8 490 985	12 174 266	12 318 306
5.	J a m b i	43 609 629	10 195 268	12 053 725	12 510 183
6.	Sumatera Selatan	17 747 278	11 682 782	13 376 825	16 565 200
7.	Bengkulu	59 610 610	6 590 792	7 655 853	8 830 386
8.	Lampung	7 159 463	8 689 231	8 209 834	8 339 099
9.	Bangka Belitung	2 628 024	3 565 501	3 689 016	3 107 340
10.	Kepulauan Riau	1 475 997	1 655 565	5 352 202	1 870 000
11.	DKI Jakarta	439 210 908	609 349 051	1 820 435 448	1 500 000 000
12.	Jawa Barat	32 248 950	50 737 863	57 326 324	57 327 135
13.	Jawa Tengah	127 651 269	64 549 242	68 250 252	74 381 172
14.	D I Yogyakarta	34 116 476	35 985 658	34 115 158	41 436 704
15.	Jawa Timur	66 237 597	66 359 751	118 823 638	126 405 756
16.	Banten	3 207 707	3 780 186	6 418 728	6 109 000
17.	B a l i	20 940 232	33 541 288	50 545 903	13 336 054
18.	Nusa Tenggara Barat	54 900 839	59 564 965	10 129 108	15 456 170
19.	Nusa Tenggara Timur	47 973 591	10 446 385	9 850 009	11 269 064
20.	Kalimantan Barat	78 579 088	84 659 762	89 055 036	110 656 328
21.	Kalimantan Tengah	25 282 312	6 493 504	6 963 110	6 346 800
22.	Kalimantan Selatan	41 660 161	41 134 809	9 275 042	7 069 118
23.	Kalimantan Timur	10 787 074	13 699 032	22 495 632	13 849 000
24.	Sulawesi Utara	11 933 613	8 866 084	14 790 121	16 800 000
25.	Sulawesi Tengah	29 650 214	14 058 850	3 123 783	2 756 277
26.	Sulawesi Selatan	108 560 877	111 625 000	113 058 779	65 414 587
27.	Sulawesi Tenggara	51 035 765	18 543 870	19 160 705	17 860 310
28.	Gorontalo	0	0	88 420	275 000
29.	Sulawesi Barat	1 908 405	2 041 884	1 422 265	4 529 000
30.	M a l u k u	25 304 142	25 426 006	25 576 587	38 487 624
31.	Maluku Utara	10 542 401	3 921 064	7 201 989	24 266 000
32.	Papua Barat	1 091 318	1 137 679	1 420 766	950 450
33.	P a p u a	21 171 950	18 889 331	15 773 347	11 900 872
JUMLAH/TOTAL		1 454 694 720	1 408 726 470	2 645 679 139	2 304 054 954

*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013

TABEL 3.1.3
TABLE

ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM INCOME OF REGIONAL GOVERNMENT CORPORATE AND SEPARATED OF WEALTH MANAGEMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	98 845 197	66 007 132	96 317 228	102 000 000
2.	Sumatera Utara	166 320 144	289 249 771	263 801 190	305 173 491
3.	Sumatera Barat	46 814 067	80 602 797	80 348 993	91 449 876
4.	R i a u	108 478 460	131 607 412	139 601 792	119 465 000
5.	J a m b i	12 443 520	21 703 149	29 984 606	28 606 827
6.	Sumatera Selatan	61 183 357	78 956 548	85 892 644	145 043 436
7.	Bengkulu	10 895 322	12 488 395	7 636 009	12 146 443
8.	Lampung	12 869 366	19 398 638	21 270 704	23 549 585
9.	Bangka Belitung	3 077 328	4 016 266	7 193 086	5 000 000
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	223 005 616	278 789 768	351 823 211	415 240 000
12.	Jawa Barat	226 365 880	229 147 336	232 647 377	240 148 000
13.	Jawa Tengah	195 631 744	211 976 159	238 231 933	252 770 000
14.	D I Yogyakarta	26 333 870	28 961 383	35 492 533	36 328 244
15.	Jawa Timur	243 826 826	365 149 165	352 899 912	328 891 596
16.	Banten	37 874 447	31 532 942	32 293 949	36 460 000
17.	B a l i	60 788 386	70 314 131	76 701 656	79 211 277
18.	Nusa Tenggara Barat	40 937 455	135 639 075	53 821 736	68 165 340
19.	Nusa Tenggara Timur	19 826 431	33 862 764	42 740 305	45 050 160
20.	Kalimantan Barat	35 202 158	40 348 020	47 620 148	50 460 829
21.	Kalimantan Tengah	17 303 860	19 942 191	22 159 324	21 115 000
22.	Kalimantan Selatan	8 388 793	53 898	42 309 263	43 528 000
23.	Kalimantan Timur	137 612 246	215 652 587	208 293 801	222 482 000
24.	Sulawesi Utara	13 553 666	23 107 361	24 433 971	30 000 000
25.	Sulawesi Tengah	11 384 015	17 796 093	5 474 894	19 932 067
26.	Sulawesi Selatan	51 551 621	62 366 615	67 557 465	66 787 175
27.	Sulawesi Tenggara	14 103 892	13 488 191	25 046 620	25 000 000
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	2 522	25 406	0	1 508 193
30.	M a l u k u	17 061 249	17 190 530	19 133 252	42 300 000
31.	Maluku Utara	76 190	65 943	73 140	0
32.	Papua Barat	1 096 715	4 961 194	8 809 755	4 961 194
33.	P a p u a	30 340 833	19 887 905	22 598 926	19 887 900
JUMLAH/TOTAL		1 933 195 176	2 524 288 765	2 642 209 423	2 882 661 633

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.4

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. FROM OTHER ORIGINAL PROVINCIAL GOV. REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	169 284 325	141 235 574	111 608 357	113 311 617
2.	Sumatera Utara	81 171 854	116 790 810	118 734 427	183 317 824
3.	Sumatera Barat	163 017 653	100 569 507	112 492 332	126 780 164
4.	R i a u	123 889 759	296 410 496	378 316 636	244 146 167
5.	J a m b i	28 220 910	113 482 634	145 525 816	90 859 617
6.	Sumatera Selatan	65 440 685	86 962 010	98 651 071	130 687 000
7.	Bengkulu	20 781 526	88 745 060	98 228 710	93 462 143
8.	Lampung	146 995 598	167 642 021	192 509 537	484 417 095
9.	Bangka Belitung	26 201 884	33 288 341	30 964 044	30 320 227
10.	Kepulauan Riau	26 965 078	46 506 887	32 100 193	33 704 358
11.	DKI Jakarta	1 478 030 507	1 716 598 322	2 147 049 773	2 837 208 766
12.	Jawa Barat	522 762 020	526 273 202	543 729 384	442 411 105
13.	Jawa Tengah	568 150 218	688 660 764	732 228 669	814 486 083
14.	D I Yogyakarta	45 041 711	66 939 738	62 824 830	51 106 986
15.	Jawa Timur	1 261 145 254	1 168 865 638	1 437 313 188	1 204 884 982
16.	Banten	72 420 806	90 374 264	99 441 752	74 950 000
17.	B a l i	90 819 547	122 828 430	101 502 318	85 882 949
18.	Nusa Tenggara Barat	27 812 321	39 177 209	101 413 212	106 812 574
19.	Nusa Tenggara Timur	35 346 703	80 790 320	91 779 636	81 607 241
20.	Kalimantan Barat	42 853 148	53 947 867	40 936 870	33 454 545
21.	Kalimantan Tengah	45 112 324	81 364 175	79 736 329	76 497 973
22.	Kalimantan Selatan	147 863 233	183 893 592	266 340 231	219 847 537
23.	Kalimantan Timur	542 481 837	592 491 534	692 755 368	505 381 000
24.	Sulawesi Utara	19 485 328	25 912 319	39 580 320	23 700 000
25.	Sulawesi Tengah	26 408 183	66 897 879	102 469 744	46 874 786
26.	Sulawesi Selatan	50 673 190	56 448 289	68 966 125	122 516 000
27.	Sulawesi Tenggara	71 291 181	51 628 568	58 044 216	46 442 660
28.	Gorontalo	12 399 161	13 331 381	11 882 294	14 207 862
29.	Sulawesi Barat	9 943 777	15 860 128	19 034 936	37 575 383
30.	M a l u k u	10 807 008	14 419 893	18 500 537	13 677 650
31.	Maluku Utara	5 225 054	4 171 048	16 895 040	12 409 472
32.	Papua Barat	23 738 786	26 555 240	22 690 339	19 300 000
33.	P a p u a	76 078 024	49 231 908	183 098 381	49 592 353
JUMLAH/TOTAL		6 037 858 593	6 928 295 048	8 257 344 615	8 451 834 119

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	984 662 488	2 262 044 905	1 334 800 286	1 506 757 369
2.	Sumatera Utara	1 247 727 249	1 373 897 545	1 605 181 560	2 007 091 016
3.	Sumatera Barat	785 574 959	897 640 879	1 143 895 852	1 271 801 566
4.	R i a u	2 986 535 692	3 226 836 381	3 618 842 731	3 537 458 033
5.	J a m b i	932 205 660	1 075 207 719	1 332 579 087	1 299 932 736
6.	Sumatera Selatan	1 823 059 237	1 992 557 000	2 378 798 651	2 644 842 763
7.	Bengkulu	598 799 426	712 256 295	882 996 673	971 418 249
8.	Lampung	908 420 168	1 063 287 255	1 280 851 522	1 421 737 554
9.	Bangka Belitung	519 288 576	700 510 364	821 499 996	933 756 954
10.	Kepulauan Riau	1 310 792 978	1 246 904 170	1 594 446 909	1 635 850 472
11.	DKI Jakarta	9 537 609 058	9 149 708 963	11 554 964 808	9 248 954 435
12.	Jawa Barat	2 427 857 461	2 526 078 027	2 832 746 609	2 583 041 105
13.	Jawa Tengah	1 811 657 949	1 950 189 365	2 318 806 100	2 420 344 820
14.	D I Yogyakarta	626 677 339	722 339 653	894 544 325	961 190 993
15.	Jawa Timur	2 445 304 862	2 528 086 450	3 069 016 102	2 895 842 710
16.	Banten	812 654 174	849 490 704	1 015 105 168	1 088 577 051
17.	B a l i	649 257 693	705 288 133	908 371 147	928 192 014
18.	Nusa Tenggara Barat	756 256 439	855 310 099	1 054 470 183	1 187 576 718
19.	Nusa Tenggara Timur	773 795 618	887 291 439	1 098 619 869	1 187 410 550
20.	Kalimantan Barat	920 636 282	1 037 860 159	1 249 834 007	1 359 685 230
21.	Kalimantan Tengah	921 225 167	1 083 088 116	1 296 011 128	1 375 916 250
22.	Kalimantan Selatan	930 124 574	1 195 565 014	1 534 463 778	1 270 214 981
23.	Kalimantan Timur	4 308 464 375	5 295 875 915	6 071 586 086	5 963 674 900
24.	Sulawesi Utara	650 530 096	729 361 142	933 366 697	1 010 030 417
25.	Sulawesi Tengah	759 172 265	864 098 666	1 042 926 565	1 158 370 880
26.	Sulawesi Selatan	959 942 494	1 106 989 189	1 349 192 581	1 457 675 124
27.	Sulawesi Tenggara	691 637 811	817 385 234	1 020 125 146	1 123 896 137
28.	Gorontalo	438 419 416	515 369 177	637 007 089	725 527 945
29.	Sulawesi Barat	456 339 988	512 742 098	671 146 618	769 834 364
30.	M a l u k u	715 451 154	828 272 878	959 240 295	1 042 228 713
31.	Maluku Utara	604 964 763	691 007 327	858 295 011	956 831 062
32.	Papua Barat	1 462 347 938	1 483 865 431	1 516 156 701	1 700 888 450
33.	P a p u a	1 762 534 290	1 893 484 847	2 118 450 110	2 502 569 266
JUMLAH/TOTAL		47 519 927 639	52 779 890 539	61 998 339 390	62 149 120 827

*) Data APBD

TABEL 3.2.1 REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 3.2.1 ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM TAX SHARES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	201 970 863	224 636 959	251 127 885	238 115 999
2.	Sumatera Utara	403 523 966	379 382 434	451 848 733	691 149 720
3.	Sumatera Barat	103 327 542	90 617 394	183 066 225	159 056 525
4.	R i a u	555 978 232	465 189 186	502 497 680	559 669 579
5.	J a m b i	157 838 823	165 268 384	217 355 132	172 944 075
6.	Sumatera Selatan	431 004 842	379 632 596	490 241 630	558 070 090
7.	Bengkulu	52 026 355	18 519 664	61 848 269	55 257 593
8.	Lampung	130 179 866	126 734 977	164 927 667	170 265 582
9.	Bangka Belitung	52 057 507	55 995 923	63 591 599	65 000 000
10.	Kepulauan Riau	234 376 006	217 469 127	1 110 423 502	220 775 139
11.	DKI Jakarta	9 398 613 244	8 747 636 170	10 984 787 700	8 732 252 723
12.	Jawa Barat	1 113 053 612	999 708 518	1 199 350 816	849 993 594
13.	Jawa Tengah	604 154 702	511 527 047	610 215 375	666 962 941
14.	D I Yogyakarta	87 816 512	75 967 202	112 691 591	92 828 719
15.	Jawa Timur	1 165 084 944	1 110 351 896	1 507 072 635	1 163 286 193
16.	Banten	416 150 982	341 626 487	451 137 610	455 001 000
17.	B a l i	150 963 833	128 698 319	180 266 157	91 990 758
18.	Nusa Tenggara Barat	112 925 607	131 498 518	169 222 739	210 658 204
19.	Nusa Tenggara Timur	68 647 419	86 798 049	100 345 548	105 220 898
20.	Kalimantan Barat	127 979 083	126 761 996	154 586 920	122 300 000
21.	Kalimantan Tengah	129 086 986	138 131 347	163 501 928	138 000 000
22.	Kalimantan Selatan	142 683 191	133 959 403	196 743 601	137 000 000
23.	Kalimantan Timur	653 810 498	688 989 457	715 648 111	820 000 000
24.	Sulawesi Utara	73 405 246	67 711 925	92 316 876	69 800 000
25.	Sulawesi Tengah	69 360 924	73 268 339	83 175 645	84 799 541
26.	Sulawesi Selatan	217 385 913	230 606 605	299 680 577	288 650 410
27.	Sulawesi Tenggara	64 736 445	64 314 517	69 714 283	70 504 626
28.	Gorontalo	26 766 048	26 066 409	30 667 268	30 033 261
29.	Sulawesi Barat	32 835 423	34 885 738	43 462 087	35 732 431
30.	M a l u k u	72 048 913	75 254 690	82 945 042	84 172 529
31.	Maluku Utara	69 097 630	67 685 366	66 657 071	73 100 425
32.	Papua Barat	184 845 998	193 485 191	191 649 305	166 750 032
33.	P a p u a	252 799 170	269 335 254	311 768 070	282 092 653
JUMLAH/TOTAL		17 556 536 325	16 447 715 087	21 314 535 277	17 661 435 240

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.2

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM NON TAX SHARES / NATURAL
RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	118 201 135	1 270 150 474	122 177 984	101 047 342
2.	Sumatera Utara	2 317 944	7 162 107	8 315 200	19 397 962
3.	Sumatera Barat	5 428 657	1 609 290	9 768 542	8 000 000
4.	R i a u	2 349 319 803	2 324 772 671	2 564 673 767	2 212 419 218
5.	J a m b i	265 593 366	301 321 322	350 162 175	239 374 809
6.	Sumatera Selatan	862 163 718	933 824 103	1 127 002 330	1 191 067 506
7.	Bengkulu	2 747 881	49 738 995	17 216 628	9 925 498
8.	Lampung	107 290 368	124 369 040	145 696 928	130 700 559
9.	Bangka Belitung	48 516 961	145 043 626	98 684 932	107 446 266
10.	Kepulauan Riau	761 696 229	611 786 301	0	722 334 793
11.	DKI Jakarta	138 995 814	192 163 351	294 849 251	215 519 246
12.	Jawa Barat	190 109 609	299 051 801	315 078 753	180 522 450
13.	Jawa Tengah	10 411 240	110 692 295	141 067 324	0
14.	D I Yogyakarta	5 480	6 070 523	5 743 298	5 531 606
15.	Jawa Timur	10 302 953	15 201 655	16 892 271	14 263 800
16.	Banten	863 573	2 300 934	3 446 980	2 360 000
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	45 501 002	31 176 098	22 303 389	60 157 798
19.	Nusa Tenggara Timur	263 132	1 036 546	538 607	375 289
20.	Kalimantan Barat	7 915 306	27 244 775	28 104 240	18 500 000
21.	Kalimantan Tengah	51 961 488	97 225 434	131 068 852	112 100 000
22.	Kalimantan Selatan	309 529 316	519 483 059	646 336 615	408 150 000
23.	Kalimantan Timur	3 620 846 163	4 517 251 513	5 268 684 084	5 080 087 723
24.	Sulawesi Utara	904 637	12 650 010	6 975 400	200 000
25.	Sulawesi Tengah	1 883 270	9 489 468	14 426 121	12 963 304
26.	Sulawesi Selatan	7 003 880	17 738 615	9 797 950	14 988 936
27.	Sulawesi Tenggara	7 106 547	18 429 560	45 493 192	19 089 000
28.	Gorontalo	167 648	127 466	191 189	196 893
29.	Sulawesi Barat	222 988	416 862	217 890	1 587 341
30.	M a l u k u	3 058 590	4 366 535	8 741 099	6 974 112
31.	Maluku Utara	30 000 369	31 698 350	50 620 895	41 451 095
32.	Papua Barat	649 958 976	549 396 430	384 475 833	404 334 671
33.	P a p u a	286 182 154	275 748 035	130 708 426	197 311 523
JUMLAH/TOTAL		9 896 470 197	12 508 737 244	11 969 460 145	11 538 378 740

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.3

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM GENERAL ALLOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	621 074 916	716 646 172	911 080 707	1 092 445 518
2.	Sumatera Utara	812 747 639	948 867 504	1 103 389 237	1 223 445 404
3.	Sumatera Barat	662 403 385	764 680 895	918 560 365	1 039 922 511
4.	R i a u	58 869 157	380 051 124	489 179 914	726 630 916
5.	J a m b i	488 743 471	583 882 413	731 952 242	836 578 062
6.	Sumatera Selatan	512 083 577	646 813 301	716 153 261	870 516 767
7.	Bengkulu	523 041 290	607 388 036	775 311 166	854 647 828
8.	Lampung	643 376 134	769 973 038	939 139 287	1 060 663 183
9.	Bangka Belitung	410 642 308	481 589 915	634 087 815	717 140 118
10.	Kepulauan Riau	310 161 843	395 745 542	460 857 807	656 067 630
11.	DKI Jakarta	0	209 909 442	275 327 857	301 182 466
12.	Jawa Barat	1 086 123 940	1 181 553 108	1 269 960 760	1 472 453 011
13.	Jawa Tengah	1 168 787 757	1 276 180 223	1 516 892 951	1 670 859 369
14.	D I Yogyakarta	527 471 247	620 812 328	757 056 696	828 334 768
15.	Jawa Timur	1 212 934 765	1 347 501 699	1 491 561 136	1 632 648 287
16.	Banten	381 979 019	460 383 683	530 833 378	617 081 101
17.	B a l i	489 942 535	560 673 539	694 079 080	792 365 876
18.	Nusa Tenggara Barat	573 065 430	646 671 083	809 617 715	859 353 026
19.	Nusa Tenggara Timur	674 635 569	752 057 444	940 646 764	1 003 991 703
20.	Kalimantan Barat	755 123 093	845 483 888	1 023 229 807	1 144 712 840
21.	Kalimantan Tengah	707 880 493	795 816 335	951 256 068	1 062 516 940
22.	Kalimantan Selatan	458 074 767	504 876 152	652 535 312	683 511 441
23.	Kalimantan Timur	164 514	51 446 845	52 637 761	55 539 337
24.	Sulawesi Utara	558 781 013	619 711 007	790 534 491	885 684 277
25.	Sulawesi Tengah	659 331 271	743 161 759	902 087 729	994 658 685
26.	Sulawesi Selatan	706 276 399	816 757 969	996 939 584	1 089 771 438
27.	Sulawesi Tenggara	595 762 419	700 836 557	870 257 871	981 035 741
28.	Gorontalo	400 750 820	461 118 102	582 140 302	652 284 261
29.	Sulawesi Barat	405 749 577	441 578 798	590 680 361	685 497 592
30.	M a l u k u	607 572 176	703 993 953	829 491 474	897 657 192
31.	Maluku Utara	479 480 664	540 389 811	703 159 025	772 591 162
32.	Papua Barat	605 786 464	700 444 910	901 398 453	1 064 872 637
33.	P a p u a	1 148 497 966	1 276 285 908	1 569 782 444	1 889 267 850
JUMLAH/TOTAL		19 247 315 618	22 553 282 483	27 381 818 820	31 115 928 937

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.4

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM SPECIAL ALLOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	43 415 574	50 611 300	50 413 710	75 148 510
2.	Sumatera Utara	29 137 700	38 485 500	41 628 390	73 097 930
3.	Sumatera Barat	14 415 375	40 733 300	32 500 720	64 822 530
4.	R i a u	22 368 500	56 823 400	62 491 370	38 738 320
5.	J a m b i	20 030 000	24 735 600	33 109 538	51 035 790
6.	Sumatera Selatan	17 807 100	32 287 000	45 401 430	25 188 400
7.	Bengkulu	20 983 900	36 609 600	28 620 610	51 587 330
8.	Lampung	27 573 800	42 210 200	31 087 640	60 108 230
9.	Bangka Belitung	8 071 800	17 880 900	25 135 650	44 170 570
10.	Kepulauan Riau	4 558 900	21 903 200	23 165 600	36 672 910
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	38 570 300	45 764 600	48 356 280	80 072 050
13.	Jawa Tengah	28 304 250	51 789 800	50 630 450	82 522 510
14.	D I Yogyakarta	11 384 100	19 489 600	19 052 740	34 495 900
15.	Jawa Timur	56 982 200	55 031 200	53 490 060	85 644 430
16.	Banten	13 660 600	45 179 600	29 687 200	14 134 950
17.	B a l i	8 351 325	15 916 275	34 025 910	43 835 380
18.	Nusa Tenggara Barat	24 764 400	45 964 400	53 326 340	57 407 690
19.	Nusa Tenggara Timur	30 249 498	47 399 400	57 088 950	77 822 660
20.	Kalimantan Barat	29 618 800	38 369 500	43 913 040	74 172 390
21.	Kalimantan Tengah	32 296 200	51 915 000	50 184 280	63 299 310
22.	Kalimantan Selatan	19 837 300	37 246 400	38 848 250	41 553 540
23.	Kalimantan Timur	33 643 200	38 188 100	34 616 130	8 047 840
24.	Sulawesi Utara	17 439 200	29 288 200	43 539 930	54 346 140
25.	Sulawesi Tengah	28 596 800	38 179 100	43 237 070	65 949 350
26.	Sulawesi Selatan	29 276 302	41 886 000	42 774 470	64 264 340
27.	Sulawesi Tenggara	24 032 400	33 804 600	34 659 800	53 266 770
28.	Gorontalo	10 734 900	28 057 200	24 008 330	43 013 530
29.	Sulawesi Barat	17 532 000	35 860 700	36 786 280	47 017 000
30.	M a l u k u	32 771 475	44 657 700	38 062 680	53 424 880
31.	Maluku Utara	26 386 100	51 233 800	37 858 020	69 688 380
32.	Papua Barat	21 756 500	40 538 900	38 633 110	64 931 110
33.	P a p u a	75 055 000	72 115 650	106 191 170	133 897 240
JUMLAH/TOTAL		819 605 499	1 270 155 725	1 332 525 148	1 833 377 910

*) Data APBD

TABEL 3.3 REALISASI PENDAPATAN LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 3.3 ACTUAL OTHER LEGAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	5 186 203 171	4 545 435 067	6 943 622 386	7 701 830 264
2.	Sumatera Utara	83 128 574	6 122 275	1 544 552 842	1 665 411 603
3.	Sumatera Barat	128 575 477	26 216 547	553 220 265	570 290 320
4.	R i a u	21 044 175	3 473 322	639 784 644	658 627 308
5.	J a m b i	21 350 836	19 366 614	326 292 542	342 027 690
6.	Sumatera Selatan	30 016 490	122 308 054	843 346 041	836 456 250
7.	Bengkulu	50 969 719	13 797 738	195 760 447	207 628 920
8.	Lampung	64 923 055	69 027 926	773 451 562	805 578 818
9.	Bangka Belitung	614 512	33 778 571	125 063 816	141 976 850
10.	Kepulauan Riau	20 790 151	9 073 500	155 910 740	188 219 503
11.	DKI Jakarta	596 385 753	1 321 665 225	1 783 413 796	5 605 933 431
12.	Jawa Barat	62 087 407	25 138 406	4 062 464 971	4 186 535 489
13.	Jawa Tengah	29 525 813	33 247 287	2 746 365 589	2 884 266 841
14.	D I Yogyakarta	7 325 681	15 458 293	273 126 857	311 574 558
15.	Jawa Timur	56 709 808	66 672 450	2 748 395 878	2 866 268 613
16.	Banten	5 197 014	10 554 077	1 002 716 972	1 052 169 690
17.	B a l i	194 719 389	233 171 247	682 671 342	710 200 976
18.	Nusa Tenggara Barat	620 663	92 749 975	442 367 135	502 576 250
19.	Nusa Tenggara Timur	16 121 504	45 350 000	683 264 995	721 517 095
20.	Kalimantan Barat	81 047 836	83 900 826	518 653 402	540 573 810
21.	Kalimantan Tengah	129 983 728	23 611 982	272 657 453	251 333 800
22.	Kalimantan Selatan	63 393 123	83 882 074	329 628 135	347 721 089
23.	Kalimantan Timur	21 276 953	20 013 984	404 935 033	415 613 100
24.	Sulawesi Utara	89 403 592	101 256 327	267 891 058	255 654 860
25.	Sulawesi Tengah	6 640 493	26 520 527	313 645 165	369 236 641
26.	Sulawesi Selatan	58 543 732	44 061 750	885 994 043	977 044 680
27.	Sulawesi Tenggara	24 175 000	125 424 663	352 675 057	357 236 500
28.	Gorontalo	21 848 025	24 123 537	116 123 470	121 930 890
29.	Sulawesi Barat	63 830 540	91 818 081	147 486 011	156 476 205
30.	M a l u k u	67 640 701	88 032 346	209 902 388	218 581 870
31.	Maluku Utara	13 021 032	160 973 154	222 546 023	236 848 660
32.	Papua Barat	1 819 680 723	2 063 854 826	2 181 781 583	2 410 168 734
33.	P a p u a	3 519 176 626	3 970 959 548	4 720 432 216	5 274 472 930
JUMLAH/TOTAL		12 555 971 296	13 601 040 199	37 470 143 857	43 891 984 238

*) Data APBD

**TABEL
TABLE**

3.B

**REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2010-2013**

**ACTUAL FINANCING RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 842 988 678	1 306 726 214	1 508 840 609	1 673 319 751
2.	Sumatera Utara	346 533 462	404 884 723	720 866 154	385 050 603
3.	Sumatera Barat	673 887 321	335 221 212	361 250 283	286 000 000
4.	R i a u	114 587 470	421 520 453	1 906 680 479	1 834 864 385
5.	J a m b i	201 204 877	353 260 385	632 401 128	206 452 219
6.	Sumatera Selatan	315 250 644	390 314 822	477 175 785	295 716 617
7.	Bengkulu	10 570 146	39 678 718	197 339 471	84 467 509
8.	Lampung	79 029 066	161 181 629	117 688 684	0
9.	Bangka Belitung	264 129 736	240 432 353	242 123 559	377 593 350
10.	Kepulauan Riau	242 173 799	375 005 362	290 737 799	213 578 625
11.	DKI Jakarta	3 748 512 147	4 926 078 266	6 475 552 012	8 454 553 000
12.	Jawa Barat	1 789 756 684	2 449 742 872	3 003 186 559	989 950 587
13.	Jawa Tengah	904 356 288	1 239 075 792	707 735 960	800 000 000
14.	D I Yogyakarta	256 568 355	254 231 964	293 608 593	213 738 934
15.	Jawa Timur	1 995 753 452	1 564 783 382	1 359 475 042	1 467 923 591
16.	Banten	235 495 508	535 848 290	374 844 507	364 302 500
17.	B a l i	538 452 871	704 385 153	787 311 641	783 056 121
18.	Nusa Tenggara Barat	73 514 841	17 280 030	17 713 224	17 694 889
19.	Nusa Tenggara Timur	224 112 521	120 234 844	188 710 799	118 346 207
20.	Kalimantan Barat	173 009 098	231 734 083	383 302 411	150 000 000
21.	Kalimantan Tengah	57 885 383	132 100 592	451 605 920	73 466 695
22.	Kalimantan Selatan	492 660 308	324 878 615	933 954 408	312 500 000
23.	Kalimantan Timur	808 568 904	1 652 437 549	2 837 723 895	1 500 000 000
24.	Sulawesi Utara	347 025 574	109 273 479	189 114 090	66 141 156
25.	Sulawesi Tengah	177 052 220	220 705 398	209 216 673	75 000 000
26.	Sulawesi Selatan	230 448 199	290 514 746	212 338 656	623 461 518
27.	Sulawesi Tenggara	106 197 607	198 733 017	23 590 982	183 207 183
28.	Gorontalo	65 070 534	96 844 215	63 968 779	75 600 932
29.	Sulawesi Barat	23 221 030	25 751 453	19 000 000	55 567 267
30.	M a l u k u	58 385 591	55 485 451	78 105 094	37 034 001
31.	Maluku Utara	2 872 955	15 732 309	199 701 142	100 000 000
32.	Papua Barat	129 160 000	353 183 633	398 118 932	0
33.	P a p u a	142 102 552	955 938 778	779 591 449	25 000 000
JUMLAH/TOTAL		16 670 537 821	20 503 199 782	26 442 574 719	21 843 587 640

*) Data APBD

TABEL

TABLE 4.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 4 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		53 152 485 827	66 590 354 071	101 468 624 588	111 930 423 182
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	20 692 837 531	24 825 623 272	27 208 539 791	31 076 089 278
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	9 167 475	14 724 999	25 975 172	88 881 412
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	64 605 959	39 552 236	26 641 086	42 913 300
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	4 428 118 542	7 368 705 579	33 608 704 717	36 811 925 108
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	3 627 404 487	4 007 604 216	1 402 416 897	3 110 492 495
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	13 627 990 091	17 300 751 767	20 956 233 374	20 441 086 385
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	10 552 027 515	12 842 293 763	18 004 216 615	19 233 934 669
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	150 334 227	191 098 239	235 896 936	1 125 100 535
B. BELANJA LANGSUNG		59 000 922 032	65 627 357 161	77 977 219 171	101 938 501 671
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	6 669 635 011	5 637 664 281	6 637 103 062	7 939 885 373
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	26 992 274 147	33 656 718 936	41 370 226 739	50 944 362 372
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	25 339 012 874	26 332 973 944	29 969 889 370	43 054 253 926
C. PEMBIAYAAN DAERAH		21 319 618 627	28 286 729 646	33 007 127 158	6 468 950 039
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		133 473 026 486	160 504 440 878	212 452 970 917	220 337 874 892

*) Data APBD

TABEL 4.1 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENGELUARAN**
TABLE 4.1 **(ribu rupiah), 2010-2013**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 361 186 746	2 527 577 357	3 408 378 593	3 713 199 162
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	740 542 103	811 497 925	774 594 474	916 310 730
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	598 869	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	532 841 778	614 246 212	1 065 211 457	1 573 990 293
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	768 357 850	611 421 678	515 656 041	293 971 079
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	312 466 642	236 584 907	262 803 876	275 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	204 184 835	693 635 000	553 927 060
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	6 379 504	49 641 800	96 477 745	100 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		5 167 329 622	4 847 047 931	5 348 941 351	8 066 638 060
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	295 570 080	252 925 171	303 248 909	384 171 744
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 603 848 155	3 120 139 312	4 230 353 664	5 827 025 904
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	3 267 911 387	1 473 983 448	815 338 778	1 855 440 412
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 282 287 393	1 542 421 072	1 931 663 713	4 850 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		8 810 803 761	8 917 046 360	10 688 983 657	11 784 687 222

*) Data APBD

TABEL 4.2 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.2 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 991 472 765	2 339 178 887	5 159 086 805	6 179 803 834
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	679 253 395	758 989 636	955 151 592	523 096 015
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	25 888	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	316 329 250	307 507 090	1 781 350 465	2 180 583 067
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	71 955 050	44 335 343	25 858 294	109 904 898
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	609 775 367	801 034 520	549 531 770	522 700 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	313 433 815	427 157 798	1 844 619 727	2 843 519 854
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	700 000	154 500	2 574 957	0
B. BELANJA LANGSUNG		1 675 233 409	2 272 298 276	2 474 547 705	2 679 618 419
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	138 095 739	156 928 569	160 000 784	178 746 265
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	820 332 048	1 052 132 331	1 510 939 323	1 587 471 679
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	716 805 622	1 063 237 376	803 607 598	913 400 475
C. PEMBIAYAAN DAERAH		565 463 428	751 889 462	289 070 937	7 500 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		4 232 169 602	5 363 366 625	7 922 705 447	8 866 922 253

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.3

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 031 743 732	1 150 643 751	1 592 402 826	1 814 736 277
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	452 838 728	532 674 804	524 517 313	622 017 275
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	56 700 222	44 217 000	647 568 586	630 545 014
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	55 567 604	95 346 158	13 934 490	34 559 360
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	290 666 129	402 995 188	390 898 542	399 938 494
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	172 924 980	68 280 083	15 483 895	104 787 679
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 046 069	7 130 518	0	22 888 455
B. BELANJA LANGSUNG		1 208 009 760	1 178 121 323	1 369 888 390	1 498 423 473
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	79 094 896	90 591 859	117 389 700	108 692 306
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	545 847 300	493 293 534	606 885 148	689 327 722
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	583 067 564	594 235 930	645 613 542	700 403 445
C. PEMBIAYAAN DAERAH		355 105 212	77 617 334	321 541 207	118 554 379
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 594 858 704	2 406 382 408	3 283 832 423	3 431 714 129

*) Data APBD

TABEL 4.4 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN**
TABLE 4.4 **(ribu rupiah), 2010-2013**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 633 624 557	1 726 941 928	3 245 053 341	3 556 603 354
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	740 029 953	701 024 526	790 433 933	965 770 458
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	15 272 310	0	0	5 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	148 675 000	230 628 149	1 459 570 748	1 492 519 613
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	216 582 000	197 806 681	20 053 500	51 840 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	459 865 294	511 015 529	796 726 772	553 585 769
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	43 200 000	86 365 493	178 268 388	477 387 514
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	10 000 000	101 550	0	10 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		2 633 808 101	2 538 187 733	3 425 711 796	4 875 492 961
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	330 284 401	235 117 018	247 361 895	324 437 114
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	882 439 925	960 890 615	1 216 684 489	1 863 186 965
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 421 083 775	1 342 180 100	1 961 665 412	2 687 868 882
C. PEMBIAYAAN DAERAH		194 000 000	1 596 831 277	2 083 231 162	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		4 461 432 658	5 861 960 938	8 753 996 299	8 432 096 315

*) Data APBD

TABEL 4.5 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.5 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		672 267 047	760 339 472	1 245 496 974	1 291 341 842
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	336 141 292	386 627 385	446 994 502	480 440 177
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	130 000	135 000	237 500	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	64 358 881	22 187 375	356 592 340	354 766 890
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	37 191 082	56 918 574	65 500 450	29 950 800
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	222 916 085	291 345 988	298 917 433	265 958 975
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	9 900 000	0	74 860 636	157 225 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 629 707	3 125 150	2 394 113	3 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		815 863 303	989 902 384	1 286 101 339	1 361 485 010
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	53 961 942	68 132 244	84 157 929	101 895 448
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	296 041 040	403 019 557	523 196 634	543 487 132
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	465 860 321	518 750 583	678 746 776	716 102 430
C. PEMBIAYAAN DAERAH		353 260 385	681 825 442	755 497 052	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 841 390 735	2 432 067 298	3 287 095 365	2 652 826 852

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.6

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 167 117 282	2 007 450 230	3 194 440 679	3 390 696 058
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	439 708 921	594 719 564	618 614 096	679 352 608
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	1 217 160	2 606 928	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	81 473 375	523 331 096	1 515 320 781	1 492 704 039
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	49 205 523	54 575 151	507 000	600 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	478 165 062	373 395 018	500 000 000	500 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	117 977 676	459 523 741	556 429 130	693 039 411
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	586 725	688 500	962 744	25 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 940 919 350	1 798 629 605	1 866 482 043	2 372 581 837
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	476 970 696	107 182 811	28 994 537	45 708 946
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	430 678 144	552 326 637	820 354 604	1 227 733 221
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 033 270 510	1 139 120 157	1 017 132 902	1 099 139 670
C. PEMBIAYAAN DAERAH		431 373 607	548 219 953	640 137 144	300 753 771
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		3 539 410 239	4 354 299 788	5 701 059 866	6 064 031 666

*) Data APBD

TABEL 4.7 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.7 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		521 635 607	494 038 124	786 792 391	829 288 404
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	329 366 252	364 245 284	407 803 333	453 370 991
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	61 461 173	19 369 140	221 706 458	213 803 360
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	20 358 540	9 608 034	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	99 105 386	100 815 666	153 837 811	143 338 489
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	3 944 789	0	3 444 789	7 727 648
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	7 399 467	0	0	11 047 916
B. BELANJA LANGSUNG		449 562 954	515 176 929	731 660 414	939 040 882
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	44 005 108	56 696 707	72 673 925	89 796 848
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	240 495 882	237 590 663	368 721 830	549 103 114
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	165 061 964	220 889 559	290 264 659	300 140 920
C. PEMBIAYAAN DAERAH		40 232 218	197 445 911	241 412 061	3 184 407
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 011 430 779	1 206 660 964	1 759 864 866	1 771 513 693

*) Data APBD

TABEL 4.8 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.8 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		968 441 248	1 143 029 305	1 942 405 359	2 140 377 055
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	416 719 262	441 136 156	488 121 065	597 666 152
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	38 365 623	35 896 755	741 234 652	819 448 380
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	89 264 670	110 677 874	7 840 000	8 500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	378 733 817	406 965 252	472 103 539	522 787 638
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	18 000 000	113 366 500	211 493 780	170 300 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	27 357 876	34 986 768	21 612 323	21 674 885
B. BELANJA LANGSUNG		1 036 457 939	1 423 049 501	1 892 330 184	2 270 352 796
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	84 733 817	107 811 859	135 197 636	108 342 035
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	525 914 922	683 987 620	925 181 888	1 191 843 462
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	425 809 200	631 250 022	831 950 660	970 167 299
C. PEMBIAYAAN DAERAH		165 814 010	123 093 725	24 957 424	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 170 713 197	2 689 172 531	3 859 692 967	4 410 729 851

*) Data APBD

TABEL 4.9 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.9 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		379 877 151	496 255 478	764 754 923	933 393 591
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	151 693 153	191 385 033	216 271 988	291 846 965
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	1 251 750	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	26 406 951	65 764 441	197 922 560	223 129 840
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	17 946 771	21 922 054	669 500	2 278 150
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	115 637 811	132 893 987	212 792 436	168 790 322
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	66 041 565	84 289 963	137 098 439	239 229 313
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	899 150	0	0	8 119 001
B. BELANJA LANGSUNG		482 838 623	680 428 338	567 283 797	975 865 064
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	33 420 443	36 150 068	49 903 758	92 748 562
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	136 056 175	156 720 935	226 599 151	400 764 845
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	313 362 005	487 557 335	290 780 888	482 351 657
C. PEMBIAYAAN DAERAH		249 439 075	257 245 782	295 022 224	10 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 112 154 849	1 433 929 598	1 627 060 944	1 919 258 655

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.10

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		525 340 406	861 648 228	1 041 488 315	1 097 601 245
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	162 989 135	192 313 329	212 470 060	230 548 362
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	114 556 707	82 918 650	278 411 673	323 428 850
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	74 480 407	189 914 670	115 916 316	121 586 498
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	164 514 157	255 569 138	256 225 110	235 036 535
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	8 500 000	140 932 441	177 255 623	186 001 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	300 000	0	1 209 533	1 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 198 234 307	1 085 945 217	1 208 337 100	1 456 863 541
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	179 428 467	140 004 976	165 484 844	196 404 224
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	367 237 269	686 032 380	780 511 969	877 760 226
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	651 568 571	259 907 861	262 340 287	382 699 091
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		372 188 859	304 291 009	514 323 993	116 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 095 763 572	2 251 884 454	2 764 149 408	2 670 464 786

*) Data APBD

TABEL 4.11 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.11 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		6 972 751 160	9 627 347 327	11 673 114 294	14 582 865 663
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	6 513 005 171	8 757 472 026	9 688 176 243	10 848 791 280
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	7 421 194	4 353 525	3 172 975	4 353 828
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	423 468 762	825 595 987	1 933 097 204	2 023 254 625
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	27 517 450	38 587 206	15 993 940	1 551 668 260
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 338 583	1 338 583	30 186 259	46 350 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	2 487 673	108 447 670
B. BELANJA LANGSUNG		14 580 144 679	16 796 334 862	19 885 592 605	30 993 463 301
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	2 024 843 081	1 138 088 013	1 397 773 926	1 960 104 732
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	7 312 154 901	8 341 913 514	9 703 452 919	13 300 731 866
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	5 243 146 697	7 316 333 335	8 784 365 760	15 732 626 703
C. PEMBIAYAAN DAERAH		5 221 603 301	6 799 757 252	10 296 025 165	4 403 560 668
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		26 774 499 140	33 223 439 441	41 854 732 064	49 979 889 632

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.12

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		6 265 732 992	7 606 879 466	13 648 410 111	13 841 422 993
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 380 786 123	1 442 284 168	1 511 157 915	1 673 209 654
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	12 194 120	8 962 780	15 055	10 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	156 022 746	814 847 123	6 136 668 844	5 350 065 225
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	192 865 500	491 978 475	16 685 225	25 500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	2 064 745 161	2 720 212 920	3 161 224 937	3 205 445 313
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	2 458 555 862	2 127 594 000	2 815 801 802	3 144 915 503
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	563 480	1 000 000	6 856 333	432 287 298
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 754 875 029	2 688 690 379	3 274 067 487	3 675 229 428
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	255 873 493	317 690 461	404 836 267	429 191 333
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 443 464 795	1 652 349 083	1 733 979 983	2 053 579 857
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 055 536 741	718 650 835	1 135 251 237	1 192 458 238
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 511 336 444	3 208 032 615	2 958 837 956	124 900 000
JUMLAH/TOTAL		11 531 944 465	13 503 602 460	19 881 315 554	17 641 552 421

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.13

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		3 796 513 884	5 259 700 529	8 540 012 837	9 218 308 025
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 069 384 503	1 141 188 386	1 241 600 972	1 546 700 206
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	68 261 172	104 349 805	3 123 911 500	3 978 087 983
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	344 916 345	385 841 980	7 548 325	11 862 100
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 182 878 413	1 694 471 481	2 253 337 259	2 206 450 468
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 116 008 176	1 931 020 531	1 908 190 238	1 437 313 268
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	15 065 275	2 828 346	5 424 543	37 894 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 171 519 886	2 517 005 298	2 906 831 268	3 511 928 591
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	209 968 578	240 493 048	318 033 645	386 929 259
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 542 074 984	1 812 185 242	1 977 523 313	2 128 949 800
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	419 476 324	464 327 008	611 274 310	996 049 532
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 562 639 507	1 010 039 769	955 371 554	0
JUMLAH/TOTAL		7 530 673 277	8 786 745 596	12 402 215 659	12 730 236 616

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.14

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	788 491 846	665 763 670	1 239 114 375	1 427 652 116
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	335 693 916	387 412 234	455 794 240	503 342 635
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	19 464	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	89 895 292	17 578 562	369 002 245	467 336 914
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	88 513 100	114 820 605	24 153 330	15 955 857
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	214 667 402	0	314 308 555	306 120 014
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	56 967 000	145 929 020	74 683 445	124 470 680
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 735 672	23 249	1 172 560	10 426 016
B.	BELANJA LANGSUNG	566 102 212	628 457 725	814 711 584	1 027 267 313
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	98 929 829	111 340 357	116 229 478	125 019 270
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	339 709 271	374 323 535	482 062 124	609 742 632
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	127 463 112	142 793 833	216 419 982	292 505 411
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	276 179 393	564 921 400	411 516 942	45 674 600
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 630 773 451	1 859 142 795	2 465 342 901	2 500 594 029

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.15

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5 869 745 632	6 589 867 568	9 633 570 876	10 189 908 055
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 283 591 782	1 407 956 634	1 486 342 134	1 725 859 316
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	167 634	4 422 499	6 036 025	5 516 766
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	682 406 822	1 121 554 739	3 865 450 910	4 988 320 669
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	47 627 536	99 096 200	44 990 102	77 198 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	2 326 860 423	2 674 049 069	2 702 288 007	2 427 977 039
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 503 834 280	1 237 764 963	1 477 431 620	903 036 265
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	25 257 155	45 023 464	51 032 078	62 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	4 336 571 471	5 096 053 104	5 677 971 455	6 025 695 494
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	668 598 067	895 165 704	1 019 269 017	1 086 920 598
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	2 790 096 474	3 155 525 486	3 601 337 254	3 947 256 162
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	877 876 930	1 045 361 914	1 057 365 184	991 518 734
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	1 769 981 099	1 372 238 293	1 590 972 260	538 333 333
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		11 976 298 202	13 058 158 965	16 902 514 591	16 753 936 882

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.16

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 304 622 476	2 081 522 312	3 300 647 526	3 216 559 292
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	280 475 124	320 486 551	384 981 221	431 461 365
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	92 374 984	349 780 525	1 288 347 988	1 405 019 690
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	51 428 250	79 829 561	38 852 100	70 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	736 769 053	1 016 068 937	1 177 659 226	1 210 988 237
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	139 455 065	315 290 000	410 060 815	89 090 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 120 000	66 738	746 176	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 529 948 052	1 819 695 803	2 017 087 962	2 835 443 949
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	110 267 532	129 669 563	148 070 031	178 982 771
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	593 057 823	972 617 438	951 318 823	1 055 979 141
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	826 622 697	717 408 802	917 699 108	1 600 482 037
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		540 362 606	390 244 507	470 814 203	31 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 374 933 134	4 291 462 622	5 788 549 691	6 083 003 241

*) Data APBD

TABEL 4.17 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELUARAN**
TABLE 4.17 **(ribu rupiah), 2010-2013**
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 496 158 141	1 796 767 358	2 430 673 383	2 741 115 738
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	465 179 737	521 535 198	581 866 718	778 736 458
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4 479 600	3 999 840	3 594 375	4 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	190 010 205	226 902 827	798 197 590	769 426 239
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	313 295 312	361 339 672	25 229 500	147 596 830
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	485 833 043	640 351 377	833 781 099	618 300 554
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	24 486 688	33 256 221	180 142 797	407 708 475
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	12 873 556	9 382 223	7 861 304	15 347 182
B. BELANJA LANGSUNG		489 691 916	768 034 137	1 132 059 614	1 575 333 373
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	18 489 741	31 609 717	39 820 073	43 210 205
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	269 734 074	509 304 627	748 605 554	847 475 929
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	201 468 101	227 119 793	343 633 987	684 647 239
C. PEMBIAYAAN DAERAH		790 310 153	801 660 774	857 712 229	35 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 776 160 210	3 366 462 269	4 420 445 226	4 351 449 111

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.18

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		859 304 825	886 085 265	1 344 468 440	1 688 446 597
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	385 403 837	426 228 699	436 435 436	523 406 979
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4 929 176	2 994 069	241 576	250 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	116 432 115	138 283 581	549 159 045	744 490 399
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	96 006 383	99 291 085	82 354 460	81 689 084
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	201 232 154	176 666 844	195 501 621	263 400 135
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	53 986 075	40 632 980	72 567 932	65 210 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 315 085	1 988 007	8 208 370	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		416 441 760	764 516 010	844 713 401	800 262 284
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	55 334 233	37 987 372	73 718 885	80 754 072
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	216 550 122	276 464 886	366 001 340	344 815 530
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	144 557 405	450 063 752	404 993 176	374 692 682
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		69 986 315	56 030 004	71 348 512	21 607 745
JUMLAH/TOTAL		1 345 732 900	1 706 631 279	2 260 530 353	2 510 316 626

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.19

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		538 353 060	572 612 934	1 439 363 825	1 641 480 848
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	330 954 210	403 101 909	426 109 148	476 232 546
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	6 819 140	6 747 249	798 677 253	973 099 125
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	49 739 498	65 081 292	64 755 830	42 801 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	96 124 597	88 049 947	136 640 474	118 915 927
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	46 618 785	8 792 886	12 888 770	12 302 250
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	8 096 830	839 651	292 350	18 130 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		609 729 330	659 269 779	724 991 767	759 337 408
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	60 105 893	71 725 069	87 761 374	105 114 160
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	373 064 516	392 209 058	392 479 928	421 322 269
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	176 558 921	195 335 652	244 750 465	232 900 979
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		164 101 590	212 822 303	265 897 258	59 870 000
JUMLAH/TOTAL		1 312 183 980	1 444 705 016	2 430 252 850	2 460 688 256

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.20

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		774 185 007	930 490 053	1 803 799 149	1 720 489 740
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	346 501 098	390 996 533	433 187 735	482 654 896
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	50 451 332	76 363 000	770 670 616	599 925 102
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	8 820 600	14 225 000	665 000	1 270 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	237 066 027	290 528 444	447 341 470	367 624 059
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	129 787 680	158 377 076	147 081 933	264 015 683
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 558 270	0	4 852 395	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		926 017 322	1 065 833 493	1 240 157 756	1 616 645 002
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	58 641 977	76 343 884	97 802 602	142 169 779
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	490 478 825	570 405 689	787 874 946	928 860 372
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	376 896 520	419 083 920	354 480 208	545 614 851
C. PEMBIAYAAN DAERAH		251 734 083	437 627 574	272 258 327	60 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 951 936 412	2 433 951 120	3 316 215 232	3 397 134 742

*) Data APBD

TABEL 4.21 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT**
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 4.21 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY**
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622 766 793	712 053 813	1 229 065 954	1 265 666 484
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	252 238 309	294 770 418	321 002 514	407 335 033
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	20 623 607	20 580 943	18 438 992	19 163 300
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	106 724 002	21 500 735	357 148 366	279 824 245
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	40 211 363	82 097 684	116 714 897	78 932 905
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	182 468 533	248 637 425	372 548 061	369 295 601
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	18 927 354	42 852 965	43 083 828	89 295 602
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 573 625	1 613 643	129 296	21 819 798
B.	BELANJA LANGSUNG	854 581 382	812 290 457	1 122 281 366	1 281 535 034
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	60 521 483	64 050 675	65 931 229	72 021 820
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	252 766 611	315 899 790	420 535 875	464 685 638
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	541 293 288	432 339 992	635 814 262	744 827 576
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	135 963 494	529 701 185	614 289 889	28 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 613 311 669	2 054 045 455	2 965 637 209	2 575 201 518

*) Data APBD

TABEL 4.22 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT**
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 142 533 972	1 195 209 614	2 284 975 632	2 371 607 921
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	422 266 361	481 313 704	503 465 989	654 418 416
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	98 645 652	62 913 943	387 088 001	421 620 080
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	100 762 508	78 488 029	25 619 950	1 160 780
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	500 000 000	544 807 040	1 347 484 542	1 256 308 645
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	18 650 302	25 948 829	18 573 830	28 100 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 209 149	1 738 069	2 743 320	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 267 561 372	1 270 524 101	1 719 293 695	2 180 098 115
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	97 580 931	108 353 995	110 249 234	152 274 294
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	492 679 168	565 324 723	753 427 953	1 028 254 371
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	677 301 273	596 845 383	855 616 508	999 569 450
C. PEMBIAYAAN DAERAH		362 341 273	1 007 187 782	1 311 295 560	130 500 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 772 436 617	3 472 921 497	5 315 564 887	4 682 206 036

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.23

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		2 936 791 901	4 679 991 711	6 126 151 181	6 371 511 836
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	405 321 821	697 747 236	765 957 565	953 503 636
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	356 170 000	683 777 651	856 807 353	1 138 015 700
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	103 863 200	130 812 760	7 073 500	5 500 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	901 354 888	1 863 896 580	2 132 835 257	2 261 555 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 170 081 992	1 303 592 971	2 354 896 682	1 982 937 500
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	164 513	8 580 824	30 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		2 981 776 194	3 463 280 908	5 231 046 557	6 528 488 164
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	472 870 254	279 925 762	493 003 243	571 375 196
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	854 936 271	1 407 152 366	2 221 477 609	2 515 206 643
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 653 969 669	1 776 202 780	2 516 565 705	3 441 906 325
C. PEMBIAYAAN DAERAH		1 934 557 684	3 326 264 857	3 366 996 662	100 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		7 853 125 779	11 469 537 476	14 724 194 400	13 000 000 000

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.24

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		632 041 039	626 908 175	860 233 283	984 576 202
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	328 811 980	368 886 616	380 581 934	473 296 342
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	114 013 707	39 085 000	279 993 486	276 749 860
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	46 816 745	29 553 813	500 000	3 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	137 100 431	187 539 904	198 156 413	220 250 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	4 000 000	1 043 603	931 330	1 280 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 298 176	799 239	70 120	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		505 382 406	658 956 657	910 885 053	977 313 696
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	48 481 823	55 670 172	56 662 658	76 765 473
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	292 540 520	369 656 152	503 625 677	540 745 863
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	164 360 063	233 630 333	350 596 718	359 802 360
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		368 273 478	189 114 091	252 904 042	20 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 505 696 923	1 474 978 923	2 024 022 378	1 981 889 898

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.25

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	504 698 487	698 081 241	961 116 052	999 171 820
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	291 205 304	329 217 099	339 580 347	363 463 371
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	169 233	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	58 608 736	107 750 566	350 879 809	383 315 127
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	13 923 701	13 158 770	6 705 100	5 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	93 456 633	179 200 037	221 449 610	203 900 466
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	47 504 113	66 280 191	41 098 927	38 492 856
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	2 474 578	1 233 026	5 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	622 558 234	728 001 093	1 051 905 688	1 208 663 847
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	59 207 689	75 293 666	114 424 678	124 982 304
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	359 558 245	444 210 633	612 618 687	697 568 466
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	203 792 300	208 496 794	324 862 323	386 113 077
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	227 405 397	205 216 673	158 588 100	6 700 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 354 662 118	1 631 299 007	2 171 609 840	2 214 535 667

*) Data APBD

TABEL 4.26 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.26 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 500 511 910	1 820 969 739	3 135 433 892	3 572 588 057
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	500 173 240	609 703 853	713 658 235	791 000 164
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	146 029	65 198	0	46 250 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	79 196 000	97 116 152	1 205 710 313	1 224 981 661
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	25 016 900	19 510 370	0	2 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	503 954 303	630 352 515	676 635 863	843 053 500
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	389 647 141	463 265 651	538 874 428	650 302 732
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 378 297	956 000	555 053	15 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		985 647 855	1 356 073 571	1 468 214 388	2 071 809 060
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	122 037 635	146 363 314	157 196 580	178 070 444
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	559 961 996	742 024 940	933 865 895	969 946 808
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	303 648 224	467 685 317	377 151 913	923 791 808
C. PEMBIAYAAN DAERAH		308 364 369	224 038 277	42 653 396	1 630 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 794 524 134	3 401 081 587	4 646 301 676	5 646 027 117

*) Data APBD

TABEL 4.27 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT**
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 4.27 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY**
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		597 811 705	699 679 828	1 163 334 848	1 362 873 338
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	312 193 785	346 075 531	421 500 309	514 681 415
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	14 762 534	31 250 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	7 860 207	9 616 003	390 194 203	306 341 500
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	75 477 400	18 176 488	0	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	79 660 625	73 047 479	104 260 188	225 513 916
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	120 671 756	250 939 327	232 530 147	254 667 739
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 947 932	1 825 000	87 467	30 418 768
B. BELANJA LANGSUNG		527 876 246	628 344 872	551 561 176	676 492 935
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	64 253 626	62 281 697	72 313 877	62 799 869
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	228 258 763	224 565 348	275 044 116	242 421 585
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	235 363 857	341 497 827	204 203 183	371 271 481
C. PEMBIAYAAN DAERAH		35 683 286	159 688 045	120 679 286	42 085 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		1 161 371 237	1 487 712 745	1 835 575 310	2 081 451 273

*) Data APBD

TABEL 4.28 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.28 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		258 083 469	323 980 000	465 099 947	519 125 858
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	165 232 594	187 796 432	209 099 424	275 667 240
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	1 928 000	1 662 444	1 506 660	4 500 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	16 142 400	66 763 216	182 988 988	138 710 890
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	4 266 797	6 965 536	39 250	1 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	39 430 333	51 024 380	55 182 733	74 705 182
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	30 930 988	8 098 192	16 088 905	18 210 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	152 357	1 669 800	193 987	6 332 546
B. BELANJA LANGSUNG		308 996 973	400 548 423	419 921 214	559 676 064
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	21 769 939	27 894 843	32 854 602	37 762 108
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	178 230 008	225 445 501	248 669 038	331 298 952
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	108 997 026	147 208 079	138 397 574	190 615 004
C. PEMBIAYAAN DAERAH		91 405 185	69 891 823	112 117 553	35 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		658 485 627	794 420 246	997 138 714	1 113 801 922

*) Data APBD

TABEL 4.29 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013**
TABLE 4.29 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		125 638 652	207 595 524	328 534 121	462 212 074
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	77 197 534	99 184 433	127 058 283	208 849 771
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	700 000	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	10 568 975	65 619 895	149 806 420	169 484 600
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	6 814 352	4 384 472	56 500	1 548 084
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	29 262 966	35 104 574	44 733 370	47 663 135
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	3 011 500	6 306 177	32 166 484
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 094 825	290 650	573 371	2 500 000
B. BELANJA LANGSUNG		482 033 514	523 772 291	539 598 513	681 600 828
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	56 863 864	60 784 227	75 318 392	40 275 038
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	220 105 790	232 296 315	328 893 109	442 443 243
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	205 063 860	230 691 749	135 387 012	198 882 547
C. PEMBIAYAAN DAERAH		25 926 974	13 254 702	109 896 935	2 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		633 599 140	744 622 517	978 029 569	1 145 812 902

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.30

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		378 672 694	426 861 315	739 129 513	965 644 769
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	265 114 043	288 445 809	321 492 983	395 492 436
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 387 266	5 883 777	1 834 405	1 510 818
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	2 498 527	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	22 417 069	20 292 109	309 662 975	426 701 598
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	23 821 897	26 361 523	10 556 957	5 896 090
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	60 881 792	59 843 044	81 427 724	92 904 595
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	966 655	7 668 832	12 543 203	27 089 232
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 585 445	18 366 221	1 611 266	16 050 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		571 608 481	683 060 114	616 858 597	604 438 657
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	54 342 524	75 806 228	75 586 968	62 512 686
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	358 404 729	352 314 914	359 287 327	387 793 494
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	158 861 228	254 938 972	181 984 302	154 132 477
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		60 765 218	83 751 369	158 762 191	24 337 136
JUMLAH/TOTAL		1 011 046 393	1 193 672 798	1 514 750 301	1 594 420 562

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.31

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	242 969 257	235 889 454	450 872 973	491 795 886
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	163 837 449	154 479 487	200 362 804	233 545 876
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	11 381 334	2 347 000	169 693 350	200 208 010
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	36 025 107	39 178 677	30 979 064	27 050 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	31 225 367	37 742 597	43 144 197	28 092 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	900 000	739 549	900 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	500 000	1 241 693	5 954 009	2 000 000
B.	BELANJA LANGSUNG	439 753 927	488 485 594	808 787 045	911 736 719
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	39 362 004	51 878 753	51 649 027	68 315 407
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	207 866 680	248 539 893	338 549 685	349 055 302
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	192 525 243	188 066 948	418 588 333	494 366 010
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	15 978 309	228 149 330	136 787 480	22 909 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		698 701 493	952 524 378	1 396 447 498	1 426 441 605

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.32

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 523 644 287	2 145 191 201	2 055 364 553	2 233 265 732
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	109 575 055	150 883 802	171 578 191	283 394 777
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	167 638 800	430 006 447	377 022 796	390 788 990
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	137 627 569	133 090 172	6 397 320	35 672 720
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	281 843 427	472 872 918	448 054 264	373 207 804
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	824 959 436	958 337 862	1 052 311 982	1 130 201 441
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 000 000	0	0	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 581 127 628	1 484 768 754	1 843 567 358	2 020 037 296
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	78 071 808	104 762 956	110 328 271	146 239 521
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	507 173 804	773 885 467	879 370 336	1 020 400 151
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	995 882 016	606 120 331	853 868 751	853 397 624
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		432 191 073	423 107 844	372 575 438	0
JUMLAH/TOTAL		3 536 962 988	4 053 067 799	4 271 507 349	4 253 303 028

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.33

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2013
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2 767 756 097	3 293 803 214	4 235 837 617	5 115 093 316
	INDIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	559 412 361	643 842 872	652 577 095	770 625 733
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	61 440 130	133 847 556	693 635 742	851 237 530
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	391 137 477	283 208 629	110 610 956	265 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	109 328 770	103 669 062	114 401 215	132 278 573
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 640 726 759	2 126 256 726	2 664 612 609	3 052 734 480
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 710 600	2 978 369	0	43 217 000
B.	BELANJA LANGSUNG	2 882 718 795	2 996 572 499	3 003 829 503	2 919 643 070
	DIRECT EXPENDITURE				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	217 653 418	222 943 523	153 855 088	177 151 542
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 260 514 917	1 351 970 752	1 540 796 548	1 558 124 028
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 404 550 460	1 421 658 224	1 309 177 867	1 184 367 500
C.	PEMBIAYAAN DAERAH	153 364 209	893 108 210	1 001 969 303	175 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		5 803 839 101	7 183 483 923	8 241 636 423	8 209 736 386

*) Data APBD

TABEL

TABLE 5.

<http://www.bbps.go.id>

TABEL 5.A REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 5.A ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 361 186 746	2 527 577 357	3 408 378 593	3 713 199 162
2.	Sumatera Utara	1 991 472 765	2 339 178 887	5 159 086 805	6 179 803 834
3.	Sumatera Barat	1 031 743 732	1 150 643 751	1 592 402 826	1 814 736 277
4.	R i a u	1 633 624 557	1 726 941 928	3 245 053 341	3 556 603 354
5.	J a m b i	672 267 047	760 339 472	1 245 496 974	1 291 341 842
6.	Sumatera Selatan	1 167 117 282	2 007 450 230	3 194 440 679	3 390 696 058
7.	Bengkulu	521 635 607	494 038 124	786 792 391	829 288 404
8.	Lampung	968 441 248	1 143 029 305	1 942 405 359	2 140 377 055
9.	Bangka Belitung	379 877 151	496 255 478	764 754 923	933 393 591
10.	Kepulauan Riau	525 340 406	861 648 228	1 041 488 315	1 097 601 245
11.	DKI Jakarta	6 972 751 160	9 627 347 327	11 673 114 294	14 582 865 663
12.	Jawa Barat	6 265 732 992	7 606 879 466	13 648 410 111	13 841 422 993
13.	Jawa Tengah	3 796 513 884	5 259 700 529	8 540 012 837	9 218 308 025
14.	D I Yogyakarta	788 491 846	665 763 670	1 239 114 375	1 427 652 116
15.	Jawa Timur	5 869 745 632	6 589 867 568	9 633 570 876	10 189 908 055
16.	Banten	1 304 622 476	2 081 522 312	3 300 647 526	3 216 559 292
17.	B a l i	1 496 158 141	1 796 767 358	2 430 673 383	2 741 115 738
18.	Nusa Tenggara Barat	859 304 825	886 085 265	1 344 468 440	1 688 446 597
19.	Nusa Tenggara Timur	538 353 060	572 612 934	1 439 363 825	1 641 480 848
20.	Kalimantan Barat	774 185 007	930 490 053	1 803 799 149	1 720 489 740
21.	Kalimantan Tengah	622 766 793	712 053 813	1 229 065 954	1 265 666 484
22.	Kalimantan Selatan	1 142 533 972	1 195 209 614	2 284 975 632	2 371 607 921
23.	Kalimantan Timur	2 936 791 901	4 679 991 711	6 126 151 181	6 371 511 836
24.	Sulawesi Utara	632 041 039	626 908 175	860 233 283	984 576 202
25.	Sulawesi Tengah	504 698 487	698 081 241	961 116 052	999 171 820
26.	Sulawesi Selatan	1 500 511 910	1 820 969 739	3 135 433 892	3 572 588 057
27.	Sulawesi Tenggara	597 811 705	699 679 828	1 163 334 848	1 362 873 338
28.	Gorontalo	258 083 469	323 980 000	465 099 947	519 125 858
29.	Sulawesi Barat	125 638 652	207 595 524	328 534 121	462 212 074
30.	M a l u k u	378 672 694	426 861 315	739 129 513	965 644 769
31.	Maluku Utara	242 969 257	235 889 454	450 872 973	491 795 886
32.	Papua Barat	1 523 644 287	2 145 191 201	2 055 364 553	2 233 265 732
33.	P a p u a	2 767 756 097	3 293 803 214	4 235 837 617	5 115 093 316
JUMLAH/TOTAL		53 152 485 827	66 590 354 071	101 468 624 588	111 930 423 182

*) Data APBD

TABEL 5.A.1 REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	740 542 103	811 497 925	774 594 474	916 310 730
2.	Sumatera Utara	679 253 395	758 989 636	955 151 592	523 096 015
3.	Sumatera Barat	452 838 728	532 674 804	524 517 313	622 017 275
4.	R i a u	740 029 953	701 024 526	790 433 933	965 770 458
5.	J a m b i	336 141 292	386 627 385	446 994 502	480 440 177
6.	Sumatera Selatan	439 708 921	594 719 564	618 614 096	679 352 608
7.	Bengkulu	329 366 252	364 245 284	407 803 333	453 370 991
8.	Lampung	416 719 262	441 136 156	488 121 065	597 666 152
9.	Bangka Belitung	151 693 153	191 385 033	216 271 988	291 846 965
10.	Kepulauan Riau	162 989 135	192 313 329	212 470 060	230 548 362
11.	DKI Jakarta	6 513 005 171	8 757 472 026	9 688 176 243	10 848 791 280
12.	Jawa Barat	1 380 786 123	1 442 284 168	1 511 157 915	1 673 209 654
13.	Jawa Tengah	1 069 384 503	1 141 188 386	1 241 600 972	1 546 700 206
14.	D I Yogyakarta	335 693 916	387 412 234	455 794 240	503 342 635
15.	Jawa Timur	1 283 591 782	1 407 956 634	1 486 342 134	1 725 859 316
16.	Banten	280 475 124	320 486 551	384 981 221	431 461 365
17.	B a l i	465 179 737	521 535 198	581 866 718	778 736 458
18.	Nusa Tenggara Barat	385 403 837	426 228 699	436 435 436	523 406 979
19.	Nusa Tenggara Timur	330 954 210	403 101 909	426 109 148	476 232 546
20.	Kalimantan Barat	346 501 098	390 996 533	433 187 735	482 654 896
21.	Kalimantan Tengah	252 238 309	294 770 418	321 002 514	407 335 033
22.	Kalimantan Selatan	422 266 361	481 313 704	503 465 989	654 418 416
23.	Kalimantan Timur	405 321 821	697 747 236	765 957 565	953 503 636
24.	Sulawesi Utara	328 811 980	368 886 616	380 581 934	473 296 342
25.	Sulawesi Tengah	291 205 304	329 217 099	339 580 347	363 463 371
26.	Sulawesi Selatan	500 173 240	609 703 853	713 658 235	791 000 164
27.	Sulawesi Tenggara	312 193 785	346 075 531	421 500 309	514 681 415
28.	Gorontalo	165 232 594	187 796 432	209 099 424	275 667 240
29.	Sulawesi Barat	77 197 534	99 184 433	127 058 283	208 849 771
30.	M a l u k u	265 114 043	288 445 809	321 492 983	395 492 436
31.	Maluku Utara	163 837 449	154 479 487	200 362 804	233 545 876
32.	Papua Barat	109 575 055	150 883 802	171 578 191	283 394 777
33.	P a p u a	559 412 361	643 842 872	652 577 095	770 625 733
JUMLAH/TOTAL		20 692 837 531	24 825 623 272	27 208 539 791	31 076 089 278

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

(ribu rupiah), 2010-2013

TABEL 5.A.2

TABLE ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT

INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	25 888	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	7 421 194	4 353 525	3 172 975	4 353 828
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	19 464	0	0	0
15.	Jawa Timur	167 634	4 422 499	6 036 025	5 516 766
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	169 233	0
26.	Sulawesi Selatan	146 029	65 198	0	46 250 000
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	14 762 534	31 250 000
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	1 387 266	5 883 777	1 834 405	1 510 818
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		9 167 475	14 724 999	25 975 172	88 881 412

*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

(ribu rupiah), 2010-2013

TABEL 5.A.3

TABLE ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	598 869	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	15 272 310	0	0	5 000 000
5.	J a m b i	130 000	135 000	237 500	0
6.	Sumatera Selatan	0	1 217 160	2 606 928	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	1 251 750	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	12 194 120	8 962 780	15 055	10 000 000
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	4 479 600	3 999 840	3 594 375	4 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	4 929 176	2 994 069	241 576	250 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	20 623 607	20 580 943	18 438 992	19 163 300
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	1 928 000	1 662 444	1 506 660	4 500 000
29.	Sulawesi Barat	700 000	0	0	0
30.	M a l u k u	2 498 527	0	0	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		64 605 959	39 552 236	26 641 086	42 913 300

*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.4 (ribu rupiah), 2010-2013

TABLE 5.A.4 ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	532 841 778	614 246 212	1 065 211 457	1 573 990 293
2.	Sumatera Utara	316 329 250	307 507 090	1 781 350 465	2 180 583 067
3.	Sumatera Barat	56 700 222	44 217 000	647 568 586	630 545 014
4.	R i a u	148 675 000	230 628 149	1 459 570 748	1 492 519 613
5.	J a m b i	64 358 881	22 187 375	356 592 340	354 766 890
6.	Sumatera Selatan	81 473 375	523 331 096	1 515 320 781	1 492 704 039
7.	Bengkulu	61 461 173	19 369 140	221 706 458	213 803 360
8.	Lampung	38 365 623	35 896 755	741 234 652	819 448 380
9.	Bangka Belitung	26 406 951	65 764 441	197 922 560	223 129 840
10.	Kepulauan Riau	114 556 707	82 918 650	278 411 673	323 428 850
11.	DKI Jakarta	423 468 762	825 595 987	1 933 097 204	2 023 254 625
12.	Jawa Barat	156 022 746	814 847 123	6 136 668 844	5 350 065 225
13.	Jawa Tengah	68 261 172	104 349 805	3 123 911 500	3 978 087 983
14.	D I Yogyakarta	89 895 292	17 578 562	369 002 245	467 336 914
15.	Jawa Timur	682 406 822	1 121 554 739	3 865 450 910	4 988 320 669
16.	Banten	92 374 984	349 780 525	1 288 347 988	1 405 019 690
17.	B a l i	190 010 205	226 902 827	798 197 590	769 426 239
18.	Nusa Tenggara Barat	116 432 115	138 283 581	549 159 045	744 490 399
19.	Nusa Tenggara Timur	6 819 140	6 747 249	798 677 253	973 099 125
20.	Kalimantan Barat	50 451 332	76 363 000	770 670 616	599 925 102
21.	Kalimantan Tengah	106 724 002	21 500 735	357 148 366	279 824 245
22.	Kalimantan Selatan	98 645 652	62 913 943	387 088 001	421 620 080
23.	Kalimantan Timur	356 170 000	683 777 651	856 807 353	1 138 015 700
24.	Sulawesi Utara	114 013 707	39 085 000	279 993 486	276 749 860
25.	Sulawesi Tengah	58 608 736	107 750 566	350 879 809	383 315 127
26.	Sulawesi Selatan	79 196 000	97 116 152	1 205 710 313	1 224 981 661
27.	Sulawesi Tenggara	7 860 207	9 616 003	390 194 203	306 341 500
28.	Gorontalo	16 142 400	66 763 216	182 988 988	138 710 890
29.	Sulawesi Barat	10 568 975	65 619 895	149 806 420	169 484 600
30.	M a l u k u	22 417 069	20 292 109	309 662 975	426 701 598
31.	Maluku Utara	11 381 334	2 347 000	169 693 350	200 208 010
32.	Papua Barat	167 638 800	430 006 447	377 022 796	390 788 990
33.	P a p u a	61 440 130	133 847 556	693 635 742	851 237 530
JUMLAH/TOTAL		4 428 118 542	7 368 705 579	33 608 704 717	36 811 925 108

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.5 (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 5.A.5 ACTUAL SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	768 357 850	611 421 678	515 656 041	293 971 079
2.	Sumatera Utara	71 955 050	44 335 343	25 858 294	109 904 898
3.	Sumatera Barat	55 567 604	95 346 158	13 934 490	34 559 360
4.	R i a u	216 582 000	197 806 681	20 053 500	51 840 000
5.	J a m b i	37 191 082	56 918 574	65 500 450	29 950 800
6.	Sumatera Selatan	49 205 523	54 575 151	507 000	600 000
7.	Bengkulu	20 358 540	9 608 034	0	0
8.	Lampung	89 264 670	110 677 874	7 840 000	8 500 000
9.	Bangka Belitung	17 946 771	21 922 054	669 500	2 278 150
10.	Kepulauan Riau	74 480 407	189 914 670	115 916 316	121 586 498
11.	DKI Jakarta	27 517 450	38 587 206	15 993 940	1 551 668 260
12.	Jawa Barat	192 865 500	491 978 475	16 685 225	25 500 000
13.	Jawa Tengah	344 916 345	385 841 980	7 548 325	11 862 100
14.	D I Yogyakarta	88 513 100	114 820 605	24 153 330	15 955 857
15.	Jawa Timur	47 627 536	99 096 200	44 990 102	77 198 000
16.	Banten	51 428 250	79 829 561	38 852 100	70 000 000
17.	B a l i	313 295 312	361 339 672	25 229 500	147 596 830
18.	Nusa Tenggara Barat	96 006 383	99 291 085	82 354 460	81 689 084
19.	Nusa Tenggara Timur	49 739 498	65 081 292	64 755 830	42 801 000
20.	Kalimantan Barat	8 820 600	14 225 000	665 000	1 270 000
21.	Kalimantan Tengah	40 211 363	82 097 684	116 714 897	78 932 905
22.	Kalimantan Selatan	100 762 508	78 488 029	25 619 950	1 160 780
23.	Kalimantan Timur	103 863 200	130 812 760	7 073 500	5 500 000
24.	Sulawesi Utara	46 816 745	29 553 813	500 000	3 000 000
25.	Sulawesi Tengah	13 923 701	13 158 770	6 705 100	5 000 000
26.	Sulawesi Selatan	25 016 900	19 510 370	0	2 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	75 477 400	18 176 488	0	0
28.	Gorontalo	4 266 797	6 965 536	39 250	1 000 000
29.	Sulawesi Barat	6 814 352	4 384 472	56 500	1 548 084
30.	M a l u k u	23 821 897	26 361 523	10 556 957	5 896 090
31.	Maluku Utara	36 025 107	39 178 677	30 979 064	27 050 000
32.	Papua Barat	137 627 569	133 090 172	6 397 320	35 672 720
33.	P a p u a	391 137 477	283 208 629	110 610 956	265 000 000
JUMLAH/TOTAL		3 627 404 487	4 007 604 216	1 402 416 897	3 110 492 495

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.6 (ribu rupiah), 2010-2013

TABLE 5.A.6 **ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	312 466 642	236 584 907	262 803 876	275 000 000
2.	Sumatera Utara	609 775 367	801 034 520	549 531 770	522 700 000
3.	Sumatera Barat	290 666 129	402 995 188	390 898 542	399 938 494
4.	R i a u	459 865 294	511 015 529	796 726 772	553 585 769
5.	J a m b i	222 916 085	291 345 988	298 917 433	265 958 975
6.	Sumatera Selatan	478 165 062	373 395 018	500 000 000	500 000 000
7.	Bengkulu	99 105 386	100 815 666	153 837 811	143 338 489
8.	Lampung	378 733 817	406 965 252	472 103 539	522 787 638
9.	Bangka Belitung	115 637 811	132 893 987	212 792 436	168 790 322
10.	Kepulauan Riau	164 514 157	255 569 138	256 225 110	235 036 535
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	2 064 745 161	2 720 212 920	3 161 224 937	3 205 445 313
13.	Jawa Tengah	1 182 878 413	1 694 471 481	2 253 337 259	2 206 450 468
14.	D I Yogyakarta	214 667 402	0	314 308 555	306 120 014
15.	Jawa Timur	2 326 860 423	2 674 049 069	2 702 288 007	2 427 977 039
16.	Banten	736 769 053	1 016 068 937	1 177 659 226	1 210 988 237
17.	B a l i	485 833 043	640 351 377	833 781 099	618 300 554
18.	Nusa Tenggara Barat	201 232 154	176 666 844	195 501 621	263 400 135
19.	Nusa Tenggara Timur	96 124 597	88 049 947	136 640 474	118 915 927
20.	Kalimantan Barat	237 066 027	290 528 444	447 341 470	367 624 059
21.	Kalimantan Tengah	182 468 533	248 637 425	372 548 061	369 295 601
22.	Kalimantan Selatan	500 000 000	544 807 040	1 347 484 542	1 256 308 645
23.	Kalimantan Timur	901 354 888	1 863 896 580	2 132 835 257	2 261 555 000
24.	Sulawesi Utara	137 100 431	187 539 904	198 156 413	220 250 000
25.	Sulawesi Tengah	93 456 633	179 200 037	221 449 610	203 900 466
26.	Sulawesi Selatan	503 954 303	630 352 515	676 635 863	843 053 500
27.	Sulawesi Tenggara	79 660 625	73 047 479	104 260 188	225 513 916
28.	Gorontalo	39 430 333	51 024 380	55 182 733	74 705 182
29.	Sulawesi Barat	29 262 966	35 104 574	44 733 370	47 663 135
30.	M a l u k u	60 881 792	59 843 044	81 427 724	92 904 595
31.	Maluku Utara	31 225 367	37 742 597	43 144 197	28 092 000
32.	Papua Barat	281 843 427	472 872 918	448 054 264	373 207 804
33.	P a p u a	109 328 770	103 669 062	114 401 215	132 278 573
JUMLAH/TOTAL		13 627 990 091	17 300 751 767	20 956 233 374	20 441 086 385

*) Data APBD

**REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013**

TABEL 5.A.7
TABLE **ACTUAL FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013**

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	204 184 835	693 635 000	553 927 060
2.	Sumatera Utara	313 433 815	427 157 798	1 844 619 727	2 843 519 854
3.	Sumatera Barat	172 924 980	68 280 083	15 483 895	104 787 679
4.	R i a u	43 200 000	86 365 493	178 268 388	477 387 514
5.	J a m b i	9 900 000	0	74 860 636	157 225 000
6.	Sumatera Selatan	117 977 676	459 523 741	556 429 130	693 039 411
7.	Bengkulu	3 944 789	0	3 444 789	7 727 648
8.	Lampung	18 000 000	113 366 500	211 493 780	170 300 000
9.	Bangka Belitung	66 041 565	84 289 963	137 098 439	239 229 313
10.	Kepulauan Riau	8 500 000	140 932 441	177 255 623	186 001 000
11.	DKI Jakarta	1 338 583	1 338 583	30 186 259	46 350 000
12.	Jawa Barat	2 458 555 862	2 127 594 000	2 815 801 802	3 144 915 503
13.	Jawa Tengah	1 116 008 176	1 931 020 531	1 908 190 238	1 437 313 268
14.	D I Yogyakarta	56 967 000	145 929 020	74 683 445	124 470 680
15.	Jawa Timur	1 503 834 280	1 237 764 963	1 477 431 620	903 036 265
16.	Banten	139 455 065	315 290 000	410 060 815	89 090 000
17.	B a l i	24 486 688	33 256 221	180 142 797	407 708 475
18.	Nusa Tenggara Barat	53 986 075	40 632 980	72 567 932	65 210 000
19.	Nusa Tenggara Timur	46 618 785	8 792 886	12 888 770	12 302 250
20.	Kalimantan Barat	129 787 680	158 377 076	147 081 933	264 015 683
21.	Kalimantan Tengah	18 927 354	42 852 965	43 083 828	89 295 602
22.	Kalimantan Selatan	18 650 302	25 948 829	18 573 830	28 100 000
23.	Kalimantan Timur	1 170 081 992	1 303 592 971	2 354 896 682	1 982 937 500
24.	Sulawesi Utara	4 000 000	1 043 603	931 330	1 280 000
25.	Sulawesi Tengah	47 504 113	66 280 191	41 098 927	38 492 856
26.	Sulawesi Selatan	389 647 141	463 265 651	538 874 428	650 302 732
27.	Sulawesi Tenggara	120 671 756	250 939 327	232 530 147	254 667 739
28.	Gorontalo	30 930 988	8 098 192	16 088 905	18 210 000
29.	Sulawesi Barat	0	3 011 500	6 306 177	32 166 484
30.	M a l u k u	966 655	7 668 832	12 543 203	27 089 232
31.	Maluku Utara	0	900 000	739 549	900 000
32.	Papua Barat	824 959 436	958 337 862	1 052 311 982	1 130 201 441
33.	P a p u a	1 640 726 759	2 126 256 726	2 664 612 609	3 052 734 480
JUMLAH/TOTAL		10 552 027 515	12 842 293 763	18 004 216 615	19 233 934 669

*) Data APBD

REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

(ribu rupiah), 2010-2013

TABEL 5.A.8
TABLE

ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 379 504	49 641 800	96 477 745	100 000 000
2.	Sumatera Utara	700 000	154 500	2 574 957	0
3.	Sumatera Barat	3 046 069	7 130 518	0	22 888 455
4.	R i a u	10 000 000	101 550	0	10 500 000
5.	J a m b i	1 629 707	3 125 150	2 394 113	3 000 000
6.	Sumatera Selatan	586 725	688 500	962 744	25 000 000
7.	Bengkulu	7 399 467	0	0	11 047 916
8.	Lampung	27 357 876	34 986 768	21 612 323	21 674 885
9.	Bangka Belitung	899 150	0	0	8 119 001
10.	Kepulauan Riau	300 000	0	1 209 533	1 000 000
11.	DKI Jakarta	0	0	2 487 673	108 447 670
12.	Jawa Barat	563 480	1 000 000	6 856 333	432 287 298
13.	Jawa Tengah	15 065 275	2 828 346	5 424 543	37 894 000
14.	D I Yogyakarta	2 735 672	23 249	1 172 560	10 426 016
15.	Jawa Timur	25 257 155	45 023 464	51 032 078	62 000 000
16.	Banten	4 120 000	66 738	746 176	10 000 000
17.	B a l i	12 873 556	9 382 223	7 861 304	15 347 182
18.	Nusa Tenggara Barat	1 315 085	1 988 007	8 208 370	10 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	8 096 830	839 651	292 350	18 130 000
20.	Kalimantan Barat	1 558 270	0	4 852 395	5 000 000
21.	Kalimantan Tengah	1 573 625	1 613 643	129 296	21 819 798
22.	Kalimantan Selatan	2 209 149	1 738 069	2 743 320	10 000 000
23.	Kalimantan Timur	0	164 513	8 580 824	30 000 000
24.	Sulawesi Utara	1 298 176	799 239	70 120	10 000 000
25.	Sulawesi Tengah	0	2 474 578	1 233 026	5 000 000
26.	Sulawesi Selatan	2 378 297	956 000	555 053	15 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	1 947 932	1 825 000	87 467	30 418 768
28.	Gorontalo	152 357	1 669 800	193 987	6 332 546
29.	Sulawesi Barat	1 094 825	290 650	573 371	2 500 000
30.	M a l u k u	1 585 445	18 366 221	1 611 266	16 050 000
31.	Maluku Utara	500 000	1 241 693	5 954 009	2 000 000
32.	Papua Barat	2 000 000	0	0	20 000 000
33.	P a p u a	5 710 600	2 978 369	0	43 217 000
JUMLAH/TOTAL		150 334 227	191 098 239	235 896 936	1 125 100 535

*) Data APBD

TABEL 5.B REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 5.B **ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**
INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	5 167 329 622	4 847 047 931	5 348 941 351	8 066 638 060
2.	Sumatera Utara	1 675 233 409	2 272 298 276	2 474 547 705	2 679 618 419
3.	Sumatera Barat	1 208 009 760	1 178 121 323	1 369 888 390	1 498 423 473
4.	R i a u	2 633 808 101	2 538 187 733	3 425 711 796	4 875 492 961
5.	J a m b i	815 863 303	989 902 384	1 286 101 339	1 361 485 010
6.	Sumatera Selatan	1 940 919 350	1 798 629 605	1 866 482 043	2 372 581 837
7.	Bengkulu	449 562 954	515 176 929	731 660 414	939 040 882
8.	Lampung	1 036 457 939	1 423 049 501	1 892 330 184	2 270 352 796
9.	Bangka Belitung	482 838 623	680 428 338	567 283 797	975 865 064
10.	Kepulauan Riau	1 198 234 307	1 085 945 217	1 208 337 100	1 456 863 541
11.	DKI Jakarta	14 580 144 679	16 796 334 862	19 885 592 605	30 993 463 301
12.	Jawa Barat	2 754 875 029	2 688 690 379	3 274 067 487	3 675 229 428
13.	Jawa Tengah	2 171 519 886	2 517 005 298	2 906 831 268	3 511 928 591
14.	D I Yogyakarta	566 102 212	628 457 725	814 711 584	1 027 267 313
15.	Jawa Timur	4 336 571 471	5 096 053 104	5 677 971 455	6 025 695 494
16.	Banten	1 529 948 052	1 819 695 803	2 017 087 962	2 835 443 949
17.	B a l i	489 691 916	768 034 137	1 132 059 614	1 575 333 373
18.	Nusa Tenggara Barat	416 441 760	764 516 010	844 713 401	800 262 284
19.	Nusa Tenggara Timur	609 729 330	659 269 779	724 991 767	759 337 408
20.	Kalimantan Barat	926 017 322	1 065 833 493	1 240 157 756	1 616 645 002
21.	Kalimantan Tengah	854 581 382	812 290 457	1 122 281 366	1 281 535 034
22.	Kalimantan Selatan	1 267 561 372	1 270 524 101	1 719 293 695	2 180 098 115
23.	Kalimantan Timur	2 981 776 194	3 463 280 908	5 231 046 557	6 528 488 164
24.	Sulawesi Utara	505 382 406	658 956 657	910 885 053	977 313 696
25.	Sulawesi Tengah	622 558 234	728 001 093	1 051 905 688	1 208 663 847
26.	Sulawesi Selatan	985 647 855	1 356 073 571	1 468 214 388	2 071 809 060
27.	Sulawesi Tenggara	527 876 246	628 344 872	551 561 176	676 492 935
28.	Gorontalo	308 996 973	400 548 423	419 921 214	559 676 064
29.	Sulawesi Barat	482 033 514	523 772 291	539 598 513	681 600 828
30.	M a l u k u	571 608 481	683 060 114	616 858 597	604 438 657
31.	Maluku Utara	439 753 927	488 485 594	808 787 045	911 736 719
32.	Papua Barat	1 581 127 628	1 484 768 754	1 843 567 358	2 020 037 296
33.	P a p u a	2 882 718 795	2 996 572 499	3 003 829 503	2 919 643 070
JUMLAH/TOTAL		59 000 922 032	65 627 357 161	77 977 219 171	101 938 501 671

*) Data APBD

TABEL 5.B.1 REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010-2013
TABLE *ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013*

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	295 570 080	252 925 171	303 248 909	384 171 744
2.	Sumatera Utara	138 095 739	156 928 569	160 000 784	178 746 265
3.	Sumatera Barat	79 094 896	90 591 859	117 389 700	108 692 306
4.	R i a u	330 284 401	235 117 018	247 361 895	324 437 114
5.	J a m b i	53 961 942	68 132 244	84 157 929	101 895 448
6.	Sumatera Selatan	476 970 696	107 182 811	28 994 537	45 708 946
7.	Bengkulu	44 005 108	56 696 707	72 673 925	89 796 848
8.	Lampung	84 733 817	107 811 859	135 197 636	108 342 035
9.	Bangka Belitung	33 420 443	36 150 068	49 903 758	92 748 562
10.	Kepulauan Riau	179 428 467	140 004 976	165 484 844	196 404 224
11.	DKI Jakarta	2 024 843 081	1 138 088 013	1 397 773 926	1 960 104 732
12.	Jawa Barat	255 873 493	317 690 461	404 836 267	429 191 333
13.	Jawa Tengah	209 968 578	240 493 048	318 033 645	386 929 259
14.	D I Yogyakarta	98 929 829	111 340 357	116 229 478	125 019 270
15.	Jawa Timur	668 598 067	895 165 704	1 019 269 017	1 086 920 598
16.	Banten	110 267 532	129 669 563	148 070 031	178 982 771
17.	B a l i	18 489 741	31 609 717	39 820 073	43 210 205
18.	Nusa Tenggara Barat	55 334 233	37 987 372	73 718 885	80 754 072
19.	Nusa Tenggara Timur	60 105 893	71 725 069	87 761 374	105 114 160
20.	Kalimantan Barat	58 641 977	76 343 884	97 802 602	142 169 779
21.	Kalimantan Tengah	60 521 483	64 050 675	65 931 229	72 021 820
22.	Kalimantan Selatan	97 580 931	108 353 995	110 249 234	152 274 294
23.	Kalimantan Timur	472 870 254	279 925 762	493 003 243	571 375 196
24.	Sulawesi Utara	48 481 823	55 670 172	56 662 658	76 765 473
25.	Sulawesi Tengah	59 207 689	75 293 666	114 424 678	124 982 304
26.	Sulawesi Selatan	122 037 635	146 363 314	157 196 580	178 070 444
27.	Sulawesi Tenggara	64 253 626	62 281 697	72 313 877	62 799 869
28.	Gorontalo	21 769 939	27 894 843	32 854 602	37 762 108
29.	Sulawesi Barat	56 863 864	60 784 227	75 318 392	40 275 038
30.	M a l u k u	54 342 524	75 806 228	75 586 968	62 512 686
31.	Maluku Utara	39 362 004	51 878 753	51 649 027	68 315 407
32.	Papua Barat	78 071 808	104 762 956	110 328 271	146 239 521
33.	P a p u a	217 653 418	222 943 523	153 855 088	177 151 542
JUMLAH/TOTAL		6 669 635 011	5 637 664 281	6 637 103 062	7 939 885 373

*) Data APBD

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

(ribu rupiah), 2010-2013

TABEL 5.B.2
TABLE

ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 603 848 155	3 120 139 312	4 230 353 664	5 827 025 904
2.	Sumatera Utara	820 332 048	1 052 132 331	1 510 939 323	1 587 471 679
3.	Sumatera Barat	545 847 300	493 293 534	606 885 148	689 327 722
4.	R i a u	882 439 925	960 890 615	1 216 684 489	1 863 186 965
5.	J a m b i	296 041 040	403 019 557	523 196 634	543 487 132
6.	Sumatera Selatan	430 678 144	552 326 637	820 354 604	1 227 733 221
7.	Bengkulu	240 495 882	237 590 663	368 721 830	549 103 114
8.	Lampung	525 914 922	683 987 620	925 181 888	1 191 843 462
9.	Bangka Belitung	136 056 175	156 720 935	226 599 151	400 764 845
10.	Kepulauan Riau	367 237 269	686 032 380	780 511 969	877 760 226
11.	DKI Jakarta	7 312 154 901	8 341 913 514	9 703 452 919	13 300 731 866
12.	Jawa Barat	1 443 464 795	1 652 349 083	1 733 979 983	2 053 579 857
13.	Jawa Tengah	1 542 074 984	1 812 185 242	1 977 523 313	2 128 949 800
14.	D I Yogyakarta	339 709 271	374 323 535	482 062 124	609 742 632
15.	Jawa Timur	2 790 096 474	3 155 525 486	3 601 337 254	3 947 256 162
16.	Banten	593 057 823	972 617 438	951 318 823	1 055 979 141
17.	B a l i	269 734 074	509 304 627	748 605 554	847 475 929
18.	Nusa Tenggara Barat	216 550 122	276 464 886	366 001 340	344 815 530
19.	Nusa Tenggara Timur	373 064 516	392 209 058	392 479 928	421 322 269
20.	Kalimantan Barat	490 478 825	570 405 689	787 874 946	928 860 372
21.	Kalimantan Tengah	252 766 611	315 899 790	420 535 875	464 685 638
22.	Kalimantan Selatan	492 679 168	565 324 723	753 427 953	1 028 254 371
23.	Kalimantan Timur	854 936 271	1 407 152 366	2 221 477 609	2 515 206 643
24.	Sulawesi Utara	292 540 520	369 656 152	503 625 677	540 745 863
25.	Sulawesi Tengah	359 558 245	444 210 633	612 618 687	697 568 466
26.	Sulawesi Selatan	559 961 996	742 024 940	933 865 895	969 946 808
27.	Sulawesi Tenggara	228 258 763	224 565 348	275 044 116	242 421 585
28.	Gorontalo	178 230 008	225 445 501	248 669 038	331 298 952
29.	Sulawesi Barat	220 105 790	232 296 315	328 893 109	442 443 243
30.	M a l u k u	358 404 729	352 314 914	359 287 327	387 793 494
31.	Maluku Utara	207 866 680	248 539 893	338 549 685	349 055 302
32.	Papua Barat	507 173 804	773 885 467	879 370 336	1 020 400 151
33.	P a p u a	1 260 514 917	1 351 970 752	1 540 796 548	1 558 124 028
JUMLAH/TOTAL		26 992 274 147	33 656 718 936	41 370 226 739	50 944 362 372

*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

TABEL 5.B.3 (ribu rupiah), 2010-2013

TABLE 5.B.3 ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 267 911 387	1 473 983 448	815 338 778	1 855 440 412
2.	Sumatera Utara	716 805 622	1 063 237 376	803 607 598	913 400 475
3.	Sumatera Barat	583 067 564	594 235 930	645 613 542	700 403 445
4.	R i a u	1 421 083 775	1 342 180 100	1 961 665 412	2 687 868 882
5.	J a m b i	465 860 321	518 750 583	678 746 776	716 102 430
6.	Sumatera Selatan	1 033 270 510	1 139 120 157	1 017 132 902	1 099 139 670
7.	Bengkulu	165 061 964	220 889 559	290 264 659	300 140 920
8.	Lampung	425 809 200	631 250 022	831 950 660	970 167 299
9.	Bangka Belitung	313 362 005	487 557 335	290 780 888	482 351 657
10.	Kepulauan Riau	651 568 571	259 907 861	262 340 287	382 699 091
11.	DKI Jakarta	5 243 146 697	7 316 333 335	8 784 365 760	15 732 626 703
12.	Jawa Barat	1 055 536 741	718 650 835	1 135 251 237	1 192 458 238
13.	Jawa Tengah	419 476 324	464 327 008	611 274 310	996 049 532
14.	D I Yogyakarta	127 463 112	142 793 833	216 419 982	292 505 411
15.	Jawa Timur	877 876 930	1 045 361 914	1 057 365 184	991 518 734
16.	Banten	826 622 697	717 408 802	917 699 108	1 600 482 037
17.	B a l i	201 468 101	227 119 793	343 633 987	684 647 239
18.	Nusa Tenggara Barat	144 557 405	450 063 752	404 993 176	374 692 682
19.	Nusa Tenggara Timur	176 558 921	195 335 652	244 750 465	232 900 979
20.	Kalimantan Barat	376 896 520	419 083 920	354 480 208	545 614 851
21.	Kalimantan Tengah	541 293 288	432 339 992	635 814 262	744 827 576
22.	Kalimantan Selatan	677 301 273	596 845 383	855 616 508	999 569 450
23.	Kalimantan Timur	1 653 969 669	1 776 202 780	2 516 565 705	3 441 906 325
24.	Sulawesi Utara	164 360 063	233 630 333	350 596 718	359 802 360
25.	Sulawesi Tengah	203 792 300	208 496 794	324 862 323	386 113 077
26.	Sulawesi Selatan	303 648 224	467 685 317	377 151 913	923 791 808
27.	Sulawesi Tenggara	235 363 857	341 497 827	204 203 183	371 271 481
28.	Gorontalo	108 997 026	147 208 079	138 397 574	190 615 004
29.	Sulawesi Barat	205 063 860	230 691 749	135 387 012	198 882 547
30.	M a l u k u	158 861 228	254 938 972	181 984 302	154 132 477
31.	Maluku Utara	192 525 243	188 066 948	418 588 333	494 366 010
32.	Papua Barat	995 882 016	606 120 331	853 868 751	853 397 624
33.	P a p u a	1 404 550 460	1 421 658 224	1 309 177 867	1 184 367 500
JUMLAH/TOTAL		25 339 012 874	26 332 973 944	29 969 889 370	43 054 253 926

*) Data APBD

TABEL 5.C REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2010-2013
TABLE 5.C **ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**
INDONESIA (thousand rupiahs), 2010-2013

No.	Provinsi/Province	2010	2011	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 282 287 393	1 542 421 072	1 931 663 713	4 850 000
2.	Sumatera Utara	565 463 428	751 889 462	289 070 937	7 500 000
3.	Sumatera Barat	355 105 212	77 617 334	321 541 207	118 554 379
4.	R i a u	194 000 000	1 596 831 277	2 083 231 162	0
5.	J a m b i	353 260 385	681 825 442	755 497 052	0
6.	Sumatera Selatan	431 373 607	548 219 953	640 137 144	300 753 771
7.	Bengkulu	40 232 218	197 445 911	241 412 061	3 184 407
8.	Lampung	165 814 010	123 093 725	24 957 424	0
9.	Bangka Belitung	249 439 075	257 245 782	295 022 224	10 000 000
10.	Kepulauan Riau	372 188 859	304 291 009	514 323 993	116 000 000
11.	DKI Jakarta	5 221 603 301	6 799 757 252	10 296 025 165	4 403 560 668
12.	Jawa Barat	2 511 336 444	3 208 032 615	2 958 837 956	124 900 000
13.	Jawa Tengah	1 562 639 507	1 010 039 769	955 371 554	0
14.	D I Yogyakarta	276 179 393	564 921 400	411 516 942	45 674 600
15.	Jawa Timur	1 769 981 099	1 372 238 293	1 590 972 260	538 333 333
16.	Banten	540 362 606	390 244 507	470 814 203	31 000 000
17.	B a l i	790 310 153	801 660 774	857 712 229	35 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	69 986 315	56 030 004	71 348 512	21 607 745
19.	Nusa Tenggara Timur	164 101 590	212 822 303	265 897 258	59 870 000
20.	Kalimantan Barat	251 734 083	437 627 574	272 258 327	60 000 000
21.	Kalimantan Tengah	135 963 494	529 701 185	614 289 889	28 000 000
22.	Kalimantan Selatan	362 341 273	1 007 187 782	1 311 295 560	130 500 000
23.	Kalimantan Timur	1 934 557 684	3 326 264 857	3 366 996 662	100 000 000
24.	Sulawesi Utara	368 273 478	189 114 091	252 904 042	20 000 000
25.	Sulawesi Tengah	227 405 397	205 216 673	158 588 100	6 700 000
26.	Sulawesi Selatan	308 364 369	224 038 277	42 653 396	1 630 000
27.	Sulawesi Tenggara	35 683 286	159 688 045	120 679 286	42 085 000
28.	Gorontalo	91 405 185	69 891 823	112 117 553	35 000 000
29.	Sulawesi Barat	25 926 974	13 254 702	109 896 935	2 000 000
30.	M a l u k u	60 765 218	83 751 369	158 762 191	24 337 136
31.	Maluku Utara	15 978 309	228 149 330	136 787 480	22 909 000
32.	Papua Barat	432 191 073	423 107 844	372 575 438	0
33.	P a p u a	153 364 209	893 108 210	1 001 969 303	175 000 000
JUMLAH/TOTAL		21 319 618 627	28 286 729 646	33 007 127 158	6 468 950 039

*) Data APBD

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI 2010-2013

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Sentot Bangun Widoyono, M.A.

Editor : Mila Hertinmalyana, M.Comm.
Agus Nuwibowo, S.Si., M.M.

Penulis : Desy Apresziyanti, SST

Pengolah Data : Ruri Kartika Sari

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id

